



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Purworejo memerlukan arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam permasalahan dan isu strategis daerah, sehingga menjadi pedoman penting untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan yang disertai indikator kinerja, target, dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029.



Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. bab III : tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
- d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. bab V : penutup.

Pasal 5

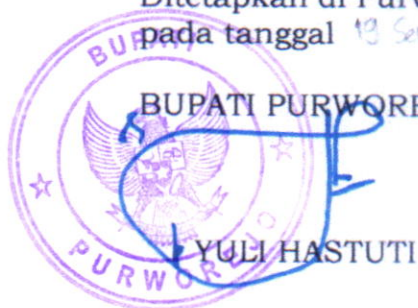
Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 19 September 2025



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 27 SERI E NOMOR 23

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Kabupaten Purworejo yang selama ini berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Selain sebagai sumber mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat, sektor pertanian juga memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Purworejo mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan ini menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi daerah, serta ketahanan pangan yang merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah.

Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, rendahnya produktivitas, keterbatasan akses teknologi dan modal, serta dinamika pasar yang kurang kondusif. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah-langkah strategis dan terencana guna mengatasi tantangan tersebut dan mendorong revitalisasi sektor pertanian sebagai basis ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menjadi sangat penting. Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan dan pengelolaan program serta kegiatan yang fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi usaha tani, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan pangan. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang jelas dalam mendukung pertumbuhan dan kemajuan sektor pertanian yang berdampak positif terhadap PDRB dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo secara keseluruhan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo merupakan kewajiban yang diatur secara jelas dalam berbagai regulasi perundang-undangan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Amanat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tertentu.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah memberikan pedoman teknis dan sistematis mengenai substansi dan tahapan penyusunan Renstra. Regulasi ini mengharuskan perangkat daerah, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, untuk menyelaraskan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya, sehingga tercipta sinergi dan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Nilai strategis Renstra terletak pada kemampuannya untuk menjadi pedoman utama dalam

menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan program serta kegiatan pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah.

Renstra berfungsi sebagai alat perencanaan yang memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan perangkat daerah selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sehingga tercipta sinergi dan integrasi antar sektor. Selain itu, Renstra menjadi instrumen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, sehingga mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal.

Lebih jauh, Renstra memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan strategis, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah kepada publik. Dengan adanya Renstra, perangkat daerah mampu mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang pembangunan, merumuskan strategi adaptif, serta mengarahkan inovasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, Renstra bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 12 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-133/2021);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3/2024);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024. Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah: 10-206/2024);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);
24. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dimaksudkan sebagai upaya untuk merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program kerja yang terintegrasi dan terarah dalam rangka meningkatkan kinerja sektor ketahanan pangan dan pertanian di Kabupaten Purworejo, serta memberikan landasan perencanaan yang sistematis, konsisten, dan terukur untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah dan prioritas pembangunan sektor ketahanan pangan dan pertanian yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo.
2. Mengembangkan strategi dan program kerja yang efektif dan efisien dalam meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan nilai tambah produk pertanian serta ketahanan pangan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian.
4. Menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan yang mendukung peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tiap tahunnya.
6. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dengan maksud dan tujuan tersebut, Renstra ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam pembangunan sektor ketahanan pangan

dan pertanian, serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PELAYANAN DAERAH

Memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat. Gambaran pelayanan perangkat daerah meliputi tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah serta kelompok sasaran layanan. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah meliputi permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat telaah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, tujuan dan sasaran renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan, dukungan terhadap nasional, provinsi, dan kegiatan unggulan daerah, serta penentuan indikator dan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

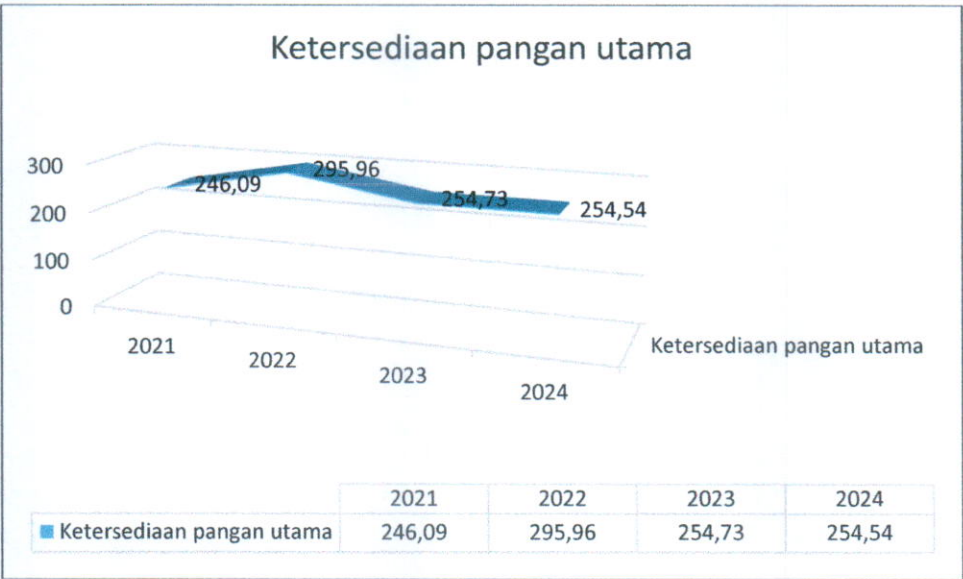
Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah menetapkan sejumlah indikator kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur capaian pembangunan sektor pangan dan pertanian. Berikut ini adalah gambaran umum pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah terkait:

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama, khususnya beras, merupakan indikator penting dalam menjamin ketahanan pangan di Kabupaten Purworejo. Untuk mengukur ketersediaan beras secara riil bagi masyarakat, dilakukan konversi produksi padi yang dihasilkan di tingkat daerah menjadi ketersediaan beras per kapita.

Berdasarkan data hasil konversi produksi padi, diketahui bahwa rata-rata ketersediaan beras per kapita di Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi dalam periode empat tahun terakhir. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi cuaca, perubahan luas panen, teknologi pertanian yang diterapkan, serta dinamika pasar dan distribusi. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 dan stabilisasi pada 2024 setelah kenaikan di tahun 2022, ketersediaan beras per kapita di Kabupaten Purworejo masih menunjukkan angka yang relatif memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo terus berupaya meningkatkan produktivitas dan stabilitas produksi padi melalui berbagai program penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian ancaman organisme pengganggu tanaman, serta peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan. Dengan demikian, diharapkan ketersediaan beras akan semakin terjamin untuk mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.



Gambar 2.1. Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Purworejo

2. Persentase Kenaikan Produksi Pertanian

Kenaikan produksi pertanian merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan sektor pertanian di Kabupaten Purworejo. Data pertumbuhan produksi pertanian selama empat tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum positif. Perubahan tingkat kenaikan produksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi iklim, ketersediaan sarana produksi, teknologi budidaya yang diterapkan, serta dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah. Kenaikan produksi yang signifikan pada tahun 2023 menandakan efektivitas berbagai upaya peningkatan produktivitas yang dilakukan, termasuk peningkatan penyuluhan pertanian, penggunaan benih unggul, dan optimalisasi penggunaan input pertanian.

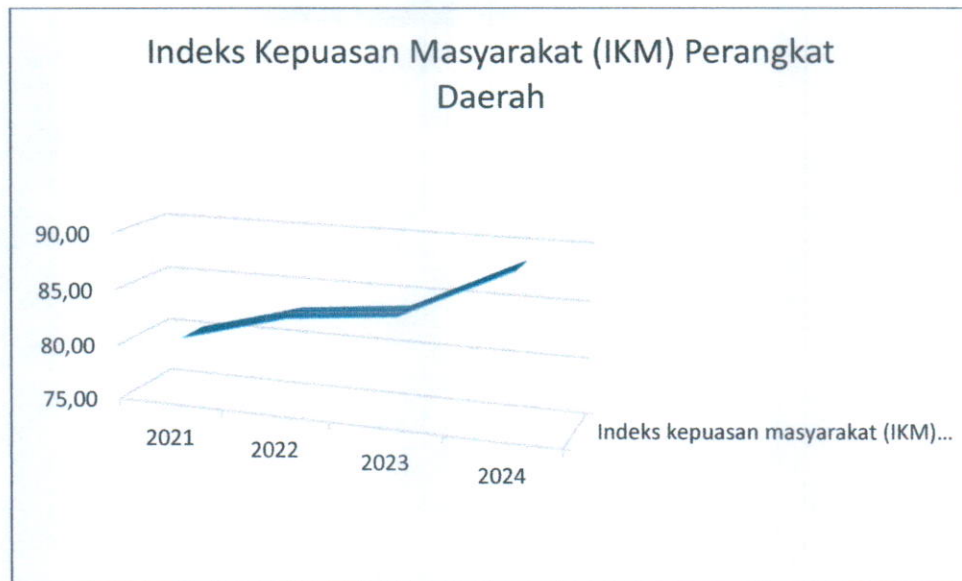
Meski terdapat fluktuasi pada tahun-tahun tertentu, secara keseluruhan tren kenaikan produksi pertanian di Kabupaten Purworejo menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui inovasi teknologi, pendampingan intensif kepada petani, serta perbaikan infrastruktur pertanian, guna memastikan peningkatan produksi yang berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan daerah



Gambar 2.2. Persentase Kenaikan Produksi Pertanian

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Perangkat Daerah

Pelayanan publik yang prima menjadi komitmen utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), diperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil IKM selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren membaik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal kecepatan layanan, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses terhadap layanan teknis, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.



Gambar 2.3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

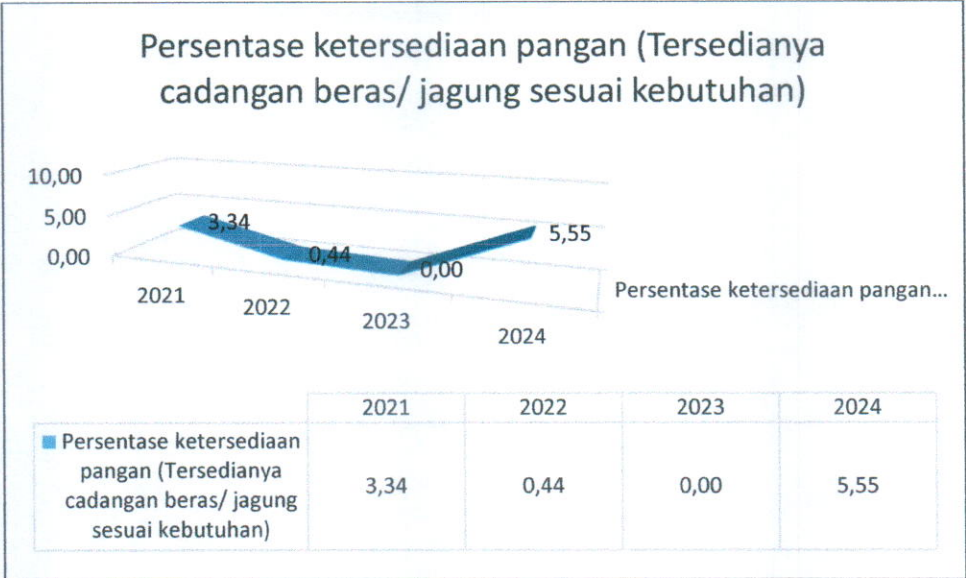
4. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah, khususnya cadangan beras, sebagai upaya menjaga stabilitas ketersediaan pangan dan mengantisipasi situasi darurat atau gangguan pasokan pangan.

Pengadaan cadangan pangan dilakukan melalui pembelian gabah dari petani lokal yang kemudian diproses dan disimpan dalam gudang khusus milik pemerintah daerah. Beras cadangan ini dikelola secara terencana dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk distribusi dalam penanganan kerawanan pangan maupun untuk menjaga stabilitas harga di pasar lokal.

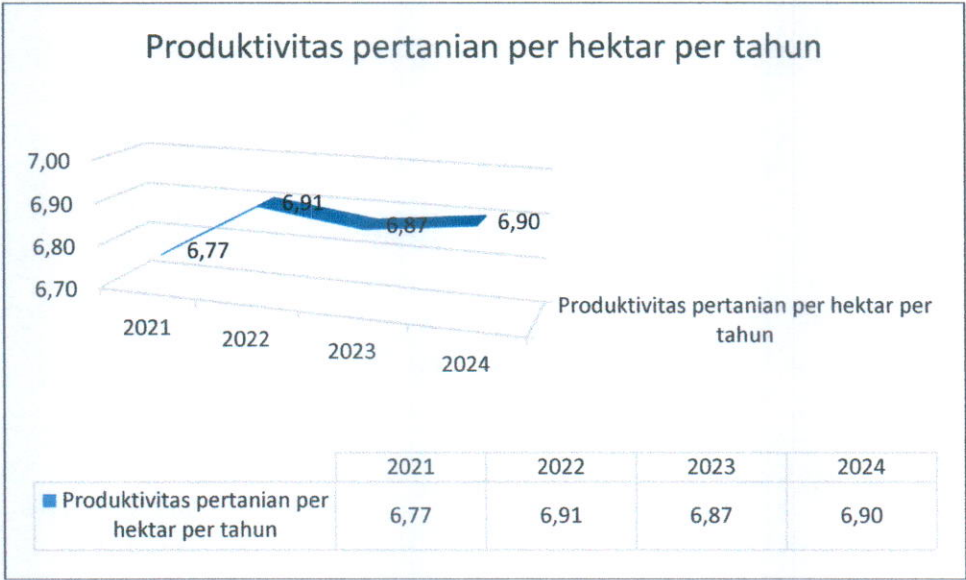
Persentase ketersediaan cadangan pangan beras dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah beras cadangan yang tersedia di gudang dengan jumlah cadangan pangan beras yang menjadi kewajiban penyediaan pemerintah Kabupaten Purworejo. Data persentase ini menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis.

Perlu dicermati bahwa ketersediaan cadangan pangan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh tidak dilakukannya pengadaan cadangan pangan setiap tahun, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan anggaran, kondisi produksi pertanian, dan kebutuhan strategis daerah. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus melakukan perencanaan dan pengelolaan cadangan pangan secara hati-hati untuk memastikan ketersediaan beras yang cukup saat dibutuhkan.



Gambar 2.4. Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan

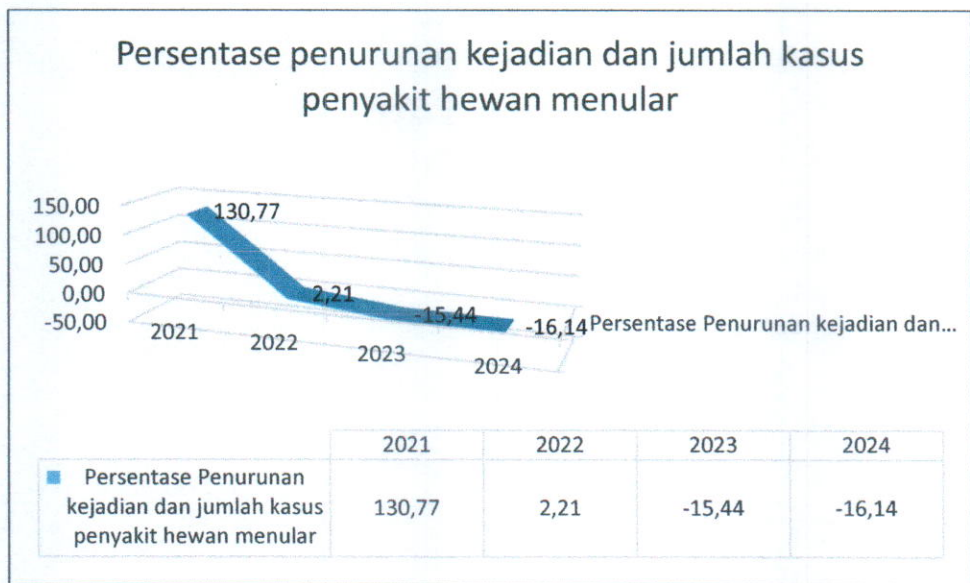
5. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun
- Produktivitas lahan menjadi indikator penting untuk mengukur efisiensi usaha tani. Dinas telah memberikan layanan berupa bimbingan teknis melalui penyuluhan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian. Hasilnya menunjukkan perbaikan produktivitas pada beberapa komoditas, meskipun peningkatan tersebut belum optimal di seluruh wilayah karena masih adanya keterbatasan sarana produksi dan perubahan iklim yang memengaruhi hasil panen. Pelayanan ke depan diarahkan pada intensifikasi pertanian ramah lingkungan dan adopsi pertanian presisi.



Gambar 2.5. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun

6. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular
- Dalam rangka menjamin keamanan pangan asal ternak dan melindungi populasi hewan ternak di daerah, Dinas memberikan layanan pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular, termasuk vaksinasi, pemeriksaan kesehatan hewan, serta respon cepat terhadap laporan penyakit. Upaya ini telah menunjukkan dampak positif dengan menurunnya tren kejadian penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan

Kuku). Keberhasilan ini tidak lepas dari peningkatan koordinasi dengan peternak, dokter hewan, dan aparaturnya desa, serta layanan kesehatan hewan yang semakin responsif. Namun, kesiapsiagaan perlu terus ditingkatkan mengingat potensi ancaman penyakit hewan bersifat dinamis dan lintas wilayah.



Gambar 2.6. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Secara umum, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menunjukkan kemajuan dalam berbagai aspek strategis. Namun, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di sektor pangan dan pertanian, diperlukan peningkatan efektivitas pelayanan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan sinergi antarstakeholder, guna memastikan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada hasil.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi berpedoman kepada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 124 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 124 Seri D Nomor 9).

1. Tugas

DKPP bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian sesuai dengan kewenangan Daerah.

2. Fungsi

DKPP dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- Pelaksanaan kebijakan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pangan, sarana dan perlindungan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta prasarana dan penyuluhan pertanian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi

3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo terdiri atas:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Sekretariat bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan;
- pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas:

- Subbagian Perencanaan;
- Subbagian Keuangan; dan
- Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

c. Bidang Pangan

Bidang Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Pangan bertugas mengelola sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, menangani kerawanan pangan dan mengawasi keamanan pangan.

Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan;
- penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan;

- penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/ tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- penanganan kerawanan pangan kewenangan;
- pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Pangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

d. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian bertugas menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian dan melaksanakan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan;
- pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro organisme;
- penyediaan benih/ bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu Daerah kabupaten/ kota lain;
- pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner bertugas melaksanakan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;

- pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

f. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

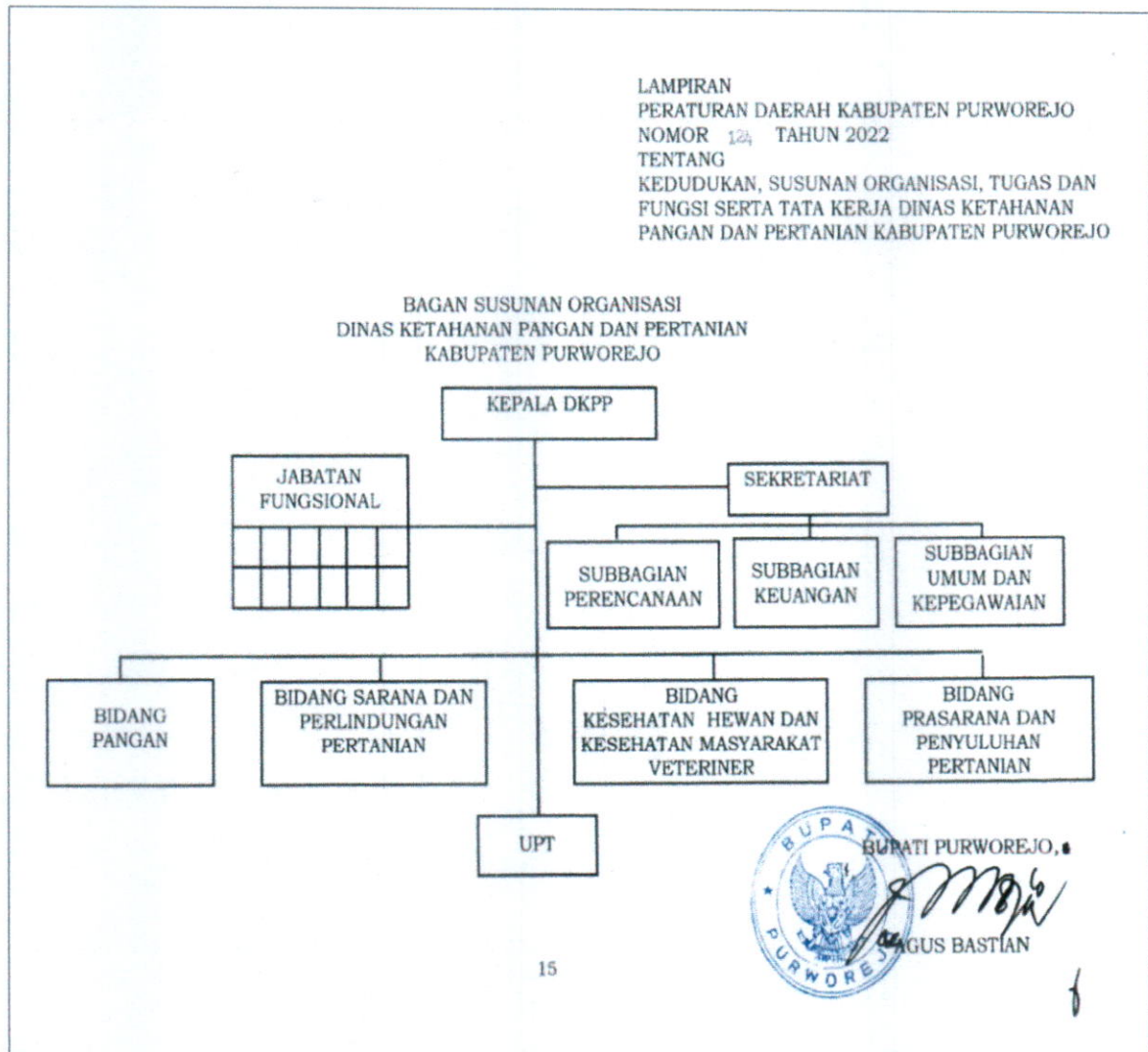
Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian bertugas menyediakan dan mengembangkan prasarana pertanian, melaksanakan penyuluhan pertanian, dan menerbitkan perizinan usaha pertanian.

Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- pengembangan prasarana pertanian;
- pembangunan prasarana pertanian;
- pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/ galur ternak;
- pengembangan lahan penggembalaan umum;
- pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam wilayah daerah;
- penerbitan izin usaha produksi benih/ bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan, rumah sakit hewan/ pasar hewan, rumah potong hewan;
- izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkaitan dengan tugas dan fungsi

Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 124 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO



Gambar 2.7. Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

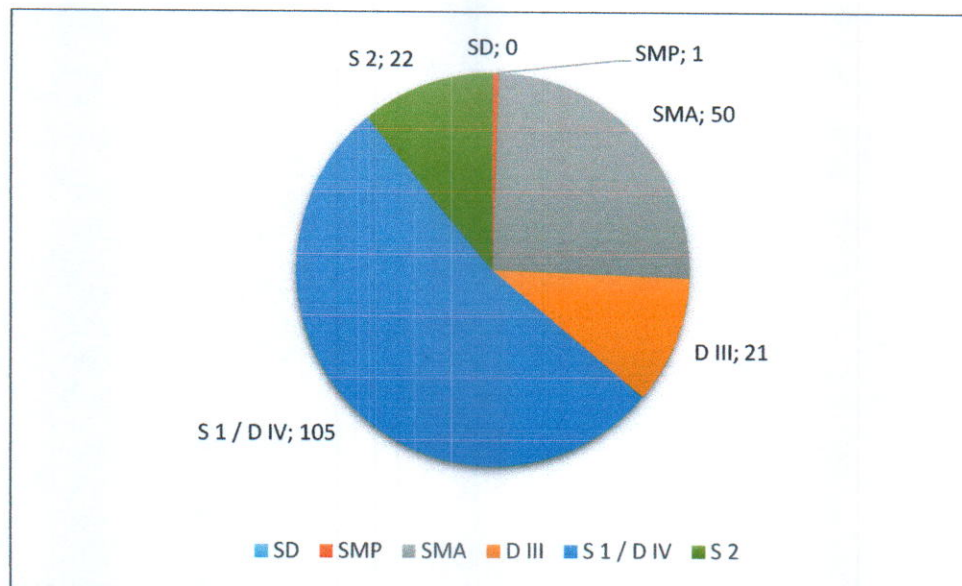
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data terkini, jumlah pegawai sebanyak 199 orang, dengan komposisi tingkat pendidikan yang cukup beragam.

Berdasarkan tingkat pendidikan formal, tidak terdapat pegawai yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD), yang menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah memiliki jenjang menengah atau lebih tinggi. Pegawai dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 50 orang, sementara yang berlatar belakang pendidikan Diploma III (D-III) sebanyak 21 orang.

Selanjutnya, pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) merupakan kelompok terbanyak, yaitu 105 orang, yang mencerminkan kapasitas intelektual dan kompetensi yang cukup kuat dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis maupun administratif. Sementara itu, sebanyak 22 orang pegawai telah menempuh pendidikan hingga jenjang Strata 2 (S2), yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam inovasi kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor ketahanan pangan dan pertanian.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah didukung oleh

sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi strategis kelembagaan, serta mampu menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan.



Gambar 2.8. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah menetapkan beberapa indikator kinerja utama yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator tersebut meliputi Skor Pola Pangan Harapan, Ketersediaan Pangan Utama, Persentase Kenaikan Produksi Pertanian, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berikut ini adalah penjelasan capaian kinerja berdasarkan target Renstra dan realisasi capaian dari tahun 2021 hingga 2024:

1. Skor Pola Pangan Harapan

Target capaian skor Pola Pangan Harapan yang ditetapkan mulai tahun 2021 sebesar 85,89 dan bertambah secara bertahap hingga mencapai target 89,92 pada tahun 2026. Realisasi capaian dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan hasil yang memuaskan dengan angka capaian 85,89 pada tahun 2021, meningkat menjadi 88,50 pada tahun 2022, 89,40 pada tahun 2023, dan 90,40 pada tahun 2024. Rasio capaian terhadap target Renstra bahkan mencapai 100% pada tahun 2021 dan meningkat di atas 100% pada tahun-tahun berikutnya, yang menandakan Dinas berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

2. Ketersediaan Pangan Utama

Indikator ketersediaan pangan utama, yang diukur dalam kilogram beras per kapita, menunjukkan tren yang cukup stabil dengan target meningkat dari 246,09 kg pada tahun 2021 menjadi 252,00 kg pada tahun 2026. Realisasi capaian ketersediaan beras per kapita pada tahun 2021 tercatat sesuai target yaitu 246,09 kg, meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 295,96 kg, kemudian menurun sedikit pada tahun 2023 menjadi 254,73 kg dan relatif stabil pada tahun 2024 dengan 254,54 kg. Rasio capaian terhadap target Renstra pada indikator ini mencapai 100% pada tahun 2021, kemudian melonjak hingga 119,34% pada tahun 2022, dan tetap di atas 100% pada tahun-tahun berikutnya, menunjukkan keberhasilan daerah dalam menjaga ketersediaan pangan utama melebihi target yang ditetapkan.

3. **Persentase Kenaikan Produksi Pertanian**
Target kenaikan produksi pertanian disepakati sebesar 1,25% setiap tahunnya dari 2021 hingga 2026. Namun realisasi kenaikan produksi menunjukkan capaian yang jauh melampaui target tersebut, dengan angka kenaikan sebesar 2,74% pada tahun 2021, 1,37% pada tahun 2022, 4,39% pada tahun 2023, dan 1,28% pada tahun 2024. Rasio capaian terhadap target Renstra pada indikator ini sangat tinggi, mencapai 219,20% pada tahun 2021, 109,60% pada tahun 2022, dan bahkan mencapai 351,20% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan produksi yang signifikan di atas ekspektasi.
4. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah**
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas ditargetkan meningkat secara bertahap dari 80,37 pada tahun 2021 menjadi 83,00 pada tahun 2026. Realisasi capaian menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan IKM sebesar 80,37 pada tahun 2021, meningkat menjadi 83,00 pada tahun 2022, 84,00 pada tahun 2023, dan mencapai 88,66 pada tahun 2024. Rasio capaian IKM terhadap target Renstra berada pada angka 100% di tahun 2021 dan meningkat menjadi 109,46% pada tahun 2024, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas semakin diterima dengan baik dan memuaskan masyarakat.
5. **Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten**
Indikator ini menunjukkan konsistensi sempurna, dengan capaian 100% setiap tahunnya sejak 2021 hingga 2024, menunjukkan bahwa seluruh kewajiban dukungan terhadap fungsi pemerintahan daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
6. **Persentase Infrastruktur yang Disediakan**
Indikator ini menunjukkan peningkatan yang tajam dari 0% pada 2021 menjadi 60% pada 2022 dan 2023, dengan pencapaian sesuai target di tahun 2024 (60%). Rasio pencapaian sempat sangat tinggi (300%) karena target awal yang masih rendah, namun telah normal pada 2024 (100%).
7. **Persentase Ketersediaan Pangan Utama**
Pengukuran capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan beras daerah dengan kebutuhan konsumsi beras masyarakat, yang diperoleh melalui data hasil survei konsumsi rumah tangga. Pencapaian indikator ini jauh melebihi target setiap tahunnya, dengan capaian tahun 2024 mencapai 286,64%.
Indikator Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Purworejo menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten melebihi target. Hal ini tidak lepas dari peran strategis Kabupaten Purworejo sebagai daerah sentra produksi beras di Jawa Tengah, yang ditunjang oleh faktor sumber daya alam, kebijakan yang berpihak pada petani, serta peran aktif masyarakat tani dalam menjaga produktivitas lahan. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan pokok masyarakat secara berkelanjutan.
8. **Penanganan Daerah Rawan/Rentan Pangan**
Kinerja sangat positif dengan pencapaian tahun 2024 mencapai 21,13%, jauh melebihi target 9,86% (rasio pencapaian 214,27%). Jumlah desa rentan rawan pangan yang berhasil diintervensi melalui pelatihan pemanfaatan pekarangan menunjukkan capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat desa,

sekaligus menjadi indikator positif terhadap partisipasi aktif masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya lokal.

Namun demikian, perlu disadari bahwa pelatihan saja tidak cukup untuk secara menyeluruh mengentaskan desa dari status kerentanan pangan. Permasalahan ketahanan pangan bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang terpadu lintas sektor. Diperlukan dukungan yang sinergis dari berbagai pihak, baik dari sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dan kelembagaan, agar intervensi yang dilakukan dapat berkelanjutan dan berdampak jangka panjang.

Dengan kolaborasi yang kuat antar sektor serta penguatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan, diharapkan desa rentan rawan pangan dapat bertransformasi menjadi desa yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

9. Persentase Pangan Segar Aman

Capaian indikator ini sempurna selama empat tahun berturut-turut (100%). Artinya, seluruh pangan segar yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, berkat pengawasan yang efektif dan edukasi terhadap pelaku usaha pangan.

10. Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani

Target terus meningkat setiap tahun. Pada 2024, capaian mencapai 143,03%, melebihi target 60%. Hal ini menunjukkan program penyediaan alat dan bahan pertanian berjalan efektif untuk mendukung produktivitas petani.

11. Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani

Capaian tahun 2024 sebesar 81,85%, melebihi target 60% (rasio 136,42%). Ini menunjukkan pembangunan dan rehabilitasi sarana pertanian (jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tersier) semakin baik dan berkontribusi terhadap peningkatan hasil pertanian.

12. Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular

Indikator ini memiliki dinamika yang cukup kompleks. Tahun 2022 terjadi lonjakan kasus (capaian hanya 2,21 terhadap target penurunan -12), namun pada 2023 dan 2024 mulai terkendali, dengan capaian -15,44 dan -16,14, hampir mendekati target penurunan -16. Rasio pencapaian tahun 2024 adalah 100,86%, menandakan bahwa program pengendalian penyakit hewan seperti vaksinasi dan biosekuriti mulai menunjukkan hasil positif.

13. Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)

Capaian indikator ini sempurna dari tahun 2021 hingga 2024 (100%), menunjukkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

14. Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian

Rasio capaian konsisten di angka 100%, artinya seluruh permohonan izin usaha pertanian yang diajukan telah difasilitasi, mendukung pengembangan agribisnis dan legalitas usaha tani.

15. Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial

Capaian konsisten setiap tahun sesuai target bertahap, yakni 20%, 40%, dan 60% pada tahun 2022–2024. Capaian rasio juga mencapai 100%, menandakan keberhasilan program regenerasi petani melalui pelibatan generasi muda dalam bidang pertanian modern dan digital.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sangat baik dan progresif, dengan mayoritas indikator melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Hal ini mencerminkan bahwa program-program strategis dinas telah

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Beberapa indikator bahkan menunjukkan lonjakan capaian yang signifikan, terutama dalam hal ketersediaan pangan, penanganan daerah rawan pangan, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan pada indikator yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penyakit hewan menular dan fluktuasi produksi pertanian, yang perlu terus dimitigasi melalui inovasi kebijakan, peningkatan sinergi antar sektor, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern.

Capaian ini juga menunjukkan bahwa Dinas telah berkontribusi signifikan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan nasional, khususnya dalam hal ketahanan pangan, kemandirian petani, dan pemberdayaan generasi muda di sektor pertanian. Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Skor pola pangan harapan				85,89	87,83	88,88	89,72	89,82	89,92	85,89	88,50	89,40	90,40			100,00	100,76	100,59	100,76		
2	Ketersediaan pangan utama				246,09	248,00	249,00	250,00	251,00	252,00	246,09	295,96	254,73	254,54			100,00	119,34	102,30	101,82		
3	Persentase kenaikan Produksi pertanian				1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	2,74	1,37	4,39	1,28			219,20	109,60	351,20	102,67		
4	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				80,37	80,50	80,55	81,00	82,00	83,00	80,37	83,00	84,00	88,66			100,00	103,11	104,28	109,46		
5	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
6	Persentase Infrastruktur yang Disediakan				-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	-	60,00	60,00	60,00			#DIV/0!	300,00	150,00	100,00		
7	Persentase Ketersediaan Pangan Utama				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	308,65	272,87	286,87	286,64			308,65	272,87	286,87	286,64		
8	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan				1,40	2,11	4,93	9,86	14,79	19,72	1,40	5,63	19,72	21,13			100,00	266,82	399,97	214,27		
9	Persentase Pangan Segar Aman				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
10	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani				-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	-	35,15	89,90	143,03			#DIV/0!	175,76	224,75	238,38		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah						Rasio Capaian Renstra Perangkat Daerah					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani				-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	-	25,19	54,07	81,85			#DIV/0!	125,93	135,18	136,42		
12	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular				-	- 12,00	- 14,00	- 16,00	- 19,00	- 23,00	130,77	2,21	- 15,44	- 16,14			#DIV/0!	-18,39	110,27	100,86		
13	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
14	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
15	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial				-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	-	20,00	40,00	60,00			#DIV/0!	100,00	100,00	100,00		

Secara umum, realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tertentu telah melampaui target anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya maksimal dari dinas dalam mengoptimalkan sumber daya anggaran guna mendukung program-program ketahanan pangan dan pertanian di daerah.

Namun, jika dicermati lebih lanjut secara terperinci, terdapat ketidaksesuaian antara realisasi anggaran pada masing-masing program atau kegiatan dengan anggaran yang telah direncanakan dalam Renstra. Beberapa kegiatan menunjukkan realisasi anggaran yang melebihi target, sementara sebagian lainnya justru mengalami kekurangan alokasi atau tidak terealisasi sesuai rencana. Ketidaksesuaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Perubahan prioritas kebijakan di tingkat daerah maupun nasional,
2. Penyesuaian alokasi anggaran akibat keterbatasan fiskal,
3. Hambatan teknis dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan,
4. Perubahan kondisi di lapangan yang memengaruhi pelaksanaan program.

Oleh karena itu, meskipun secara agregat total realisasi pendanaan pelayanan sudah melampaui target Renstra, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap pencapaian di tingkat program dan kegiatan. Hal ini penting agar ke depan penyusunan anggaran dapat lebih tepat sasaran, selaras dengan perencanaan strategis, serta mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di sektor ketahanan pangan dan pertanian. Realisasi anggaran selama periode renstra 2021-2026 seperti tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
URUSAN PANGAN		15.870.892.570	15.360.665.043	15.225.872.128	15.940.942.375	16.072.483.661	-	18.224.267.411	15.826.963.037	18.996.195.984	22.458.077.863	-		114,83	103,04	124,76	140,88	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		13.055.892.570	13.602.665.043	14.949.872.128	15.434.942.375	15.545.483.661	-	15.723.312.607	15.606.379.237	18.717.501.584	20.120.625.763	-		120,43	114,73	125,20	130,36	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		107.600.000	112.300.000	123.500.000	126.800.000	127.400.000	-	144.326.400	135.103.400	102.441.900	49.685.300	-		134,13	120,31	82,95	39,18	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20.000.000	20.900.000	29.300.000	30.000.000	30.100.000		23.826.400	27.445.000	30.610.000	23.852.600			119,13	131,32	104,47	79,51	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.100.000	1.100.000					1.500.000						136,36	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.400.000	1.500.000					1.500.000						107,14	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.400.000	1.500.000					2.000.000						142,86	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1.400.000	1.500.000					2.000.000						142,86	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.400.000	7.800.000	8.500.000	8.800.000	8.800.000		13.500.000	19.186.400	1.284.800				182,43	245,98	15,12	0,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		74.900.000	78.000.000	85.700.000	88.000.000	88.500.000		100.000.000	88.472.000	70.547.100	25.832.700			133,51	113,43	82,32	29,36	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.280.592.570	12.629.765.043	13.977.072.128	14.358.542.375	14.434.083.661	-	14.572.378.691	14.612.760.437	17.704.411.861	19.226.323.113	-		118,66	115,70	126,67	133,90	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12.268.492.570	12.617.165.043	13.963.172.128	14.344.242.375	14.419.783.661		14.556.012.091	14.597.113.437	17.688.764.861	19.218.500.013			118,65	115,69	126,68	133,98	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		700.000	700.000	800.000	800.000	800.000		1.036.000	1.000.000	1.000.000	500.000			148,00	142,86	125,00	62,50	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		11.400.000	11.900.000	13.100.000	13.500.000	13.500.000		15.330.600	14.647.000	14.647.000	7.323.100			134,48	123,08	111,81	54,25	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		700.000	700.000	800.000	800.000	800.000	-	1.000.000	709.000	-	-	-		142,86	101,29	0,00	0,00	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		700.000	700.000	800.000	800.000	800.000		1.000.000	709.000					142,86	101,29	0,00	0,00	

2

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		700.000	800.000	800.000	900.000	900.000	-	1.033.000	1.027.000	1.026.800	513.200	-		147,57	128,38	128,35	57,02	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		700.000	800.000	800.000	900.000	900.000		1.033.000	1.027.000	1.026.800	513.200			147,57	128,38	128,35	57,02	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.400.000	45.800.000	46.900.000	47.200.000	47.300.000	-	54.092.600	25.872.000	-	460.000	-		520,12	56,49	0,00	0,97	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		700.000	700.000	800.000	800.000	800.000		1.000.000	710.000		460.000			142,86	101,43	0,00	57,50	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		9.700.000	10.100.000	11.100.000	11.400.000	11.500.000		53.092.600	9.294.000					547,35	92,02	0,00	0,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000			15.868.000					#DIV/0!	79,34	0,00	0,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000								#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		297.500.000	309.800.000	340.600.000	349.900.000	351.600.000	-	395.902.700	381.742.000	346.586.200	291.392.300	-		133,08	123,22	101,76	83,28	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.700.000	3.900.000	4.200.000	4.400.000	4.400.000		5.000.000	4.023.000	4.031.700	5.513.800			135,14	103,15	95,99	125,31	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.600.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		3.499.800	2.792.000	2.782.400	3.603.000			134,61	103,41	92,75	120,10	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		132.700.000	138.300.000	152.000.000	156.000.000	157.000.000		156.273.600	188.179.800	202.025.600	203.591.300			117,76	136,07	132,91	130,51	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		6.100.000	6.300.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000		11.601.900	15.273.300	9.300.600	8.400.000			190,20	242,43	132,87	118,31	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.300.000	2.400.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000		3.092.000	2.400.000					134,43	100,00	0,00	0,00	
Penyediaan Bahan/Material		5.900.000	6.200.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000		7.999.400	7.180.000	6.814.900	3.380.000			135,58	115,81	100,22	48,29	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.600.000	2.700.000	3.000.000	3.100.000	3.100.000		13.260.000	3.750.000	3.000.000	1.800.000			510,00	138,89	100,00	58,06	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		137.600.000	143.300.000	157.500.000	161.800.000	162.600.000		183.651.000	153.600.400	105.131.000	52.081.200			133,47	107,19	66,75	32,19	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.800.000	4.600.000		11.525.000	4.543.500	13.500.000	13.023.000			288,13	113,59	300,00	271,31	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	130.000.000	50.000.000	100.000.000	130.000.000	-	74.854.800	-	58.282.600	-	-		#DIV/0!	0,00	116,57	0,00	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.000.000											#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengadaan Mebel				50.000.000										#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					50.000.000					58.282.600				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50.000.000	50.000.000		74.854.800						#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			80.000.000			80.000.000								#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		196.800.000	205.100.000	225.300.000	215.500.000	216.600.000	-	264.392.816	240.944.600	248.742.223	232.708.250	-		134,35	117,48	110,40	107,99	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		13.600.000	14.200.000	15.600.000				18.317.668						134,69	0,00	0,00	#DIV/0!	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		78.700.000	82.000.000	90.000.000	92.500.000	93.000.000		105.100.000	85.400.600	90.850.975	88.075.250			133,55	104,15	100,95	95,22	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		104.500.000	108.900.000	119.700.000	123.000.000	123.600.000		140.975.148	155.544.000	157.891.248	144.633.000			134,90	142,83	131,91	117,59	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		161.600.000	168.400.000	184.900.000	235.300.000	236.800.000	-	215.331.600	208.220.800	256.010.000	319.543.600	-		133,25	123,65	138,46	135,80	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					45.000.000	45.000.000					43.960.000			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	97,69	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		113.300.000	118.100.000	129.800.000	133.300.000	134.000.000		151.360.000	146.448.200	163.890.000	196.320.000			133,59	124,00	126,26	147,28	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.000.000	9.400.000	10.300.000	10.600.000	10.600.000		12.056.000	12.000.000	12.050.000	17.320.000			133,96	127,66	116,99	163,40	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		34.900.000	36.400.000	40.000.000	41.000.000	41.300.000		46.720.000	38.777.600	72.660.000	51.900.000			133,87	106,53	181,65	126,59	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.500.000	2.600.000	2.800.000	2.900.000	2.900.000		3.376.000	9.170.000	5.490.000	8.540.000			135,04	352,69	196,07	294,48	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah		1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000		1.819.600	1.825.000	1.920.000	1.503.600			95,77	96,05	96,00	60,14	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		2.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-	2.151.000.000	-	-	1.019.576.000	-		86,04	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		2.500.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-	2.151.000.000	-	-	1.019.576.000	-		86,04	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan infrastruktur lumbung pangan		2.500.000.000	1.500.000.000					2.151.000.000						86,04	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				1.500.000.000	1.500.000.000	1.275.000.000					1.019.576.000			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	67,97	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		180.000.000	161.000.000	168.000.000	400.000.000	415.000.000	-	244.415.304	139.743.800	132.574.800	1.231.619.700	-		135,79	86,80	78,91	307,90	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		105.000.000	97.000.000	110.000.000	142.000.000	127.000.000	-	111.561.136	45.092.000	80.457.800	67.963.900	-		106,25	46,49	73,14	47,86	
Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan		35.000.000	37.000.000					30.708.068	24.679.000					87,74	66,70	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan				25.000.000	25.000.000	25.000.000				27.223.000	10.708.000			#DIV/0!	#DIV/0!	108,89	42,83	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				35.000.000	35.000.000	40.000.000				24.350.000	12.251.300			#DIV/0!	#DIV/0!	69,57	35,00	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		70.000.000	50.000.000	50.000.000	82.000.000	57.000.000		69.251.268	20.413.000	28.884.800	45.004.600			98,93	40,83	57,77	54,88	
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			10.000.000			5.000.000		11.601.800						#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota					200.000.000	200.000.000	-	-	-	-	1.145.555.800	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	572,78	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota					200.000.000	200.000.000					1.145.555.800			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	572,78	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		75.000.000	64.000.000	58.000.000	58.000.000	88.000.000	-	132.854.168	94.651.800	52.117.000	18.100.000	-		177,14	147,89	89,86	31,21	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		5.625.000	8.000.000					70,31	100,00	0,00	0,00	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berdasarkan Sumber Daya Lokal		67.000.000	56.000.000	50.000.000	50.000.000	80.000.000		127.229.168	86.651.800	52.117.000	18.100.000			189,89	154,74	104,23	36,20	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		22.000.000	16.000.000	19.000.000	14.000.000	20.000.000	-	19.000.000	30.244.000	106.794.000	61.464.900	-		86,36	189,03	562,07	439,04	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan		11.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	7.410.500	-		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan		11.000.000		5.000.000		5.000.000					7.410.500			0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		11.000.000	16.000.000	14.000.000	14.000.000	15.000.000	-	19.000.000	30.244.000	106.794.000	54.054.400	-		172,73	189,03	762,81	386,10	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota		11.000.000	16.000.000	14.000.000	14.000.000	15.000.000		19.000.000	30.244.000	106.794.000	54.054.400			172,73	189,03	762,81	386,10	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		113.000.000	81.000.000	89.000.000	92.000.000	92.000.000	-	86.539.500	50.596.000	39.325.600	24.791.500	-		76,58	62,46	44,19	26,95	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		113.000.000	81.000.000	89.000.000	92.000.000	92.000.000	-	86.539.500	50.596.000	39.325.600	24.791.500	-		76,58	62,46	44,19	26,95	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		20.000.000	20.000.000					17.625.000	15.372.000					88,13	76,86	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				25.000.000	27.000.000	27.000.000				15.372.000	7.501.900			#DIV/0!	#DIV/0!	61,49	27,78	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		55.000.000	23.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		35.199.600	10.624.000	10.624.000	4.675.700			64,00	46,19	42,50	18,70	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		38.000.000	38.000.000					33.714.900	24.600.000					88,72	64,74	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				39.000.000	40.000.000	40.000.000				13.329.600	12.613.900			#DIV/0!	#DIV/0!	34,18	31,53	
URUSAN PERTANIAN		19.194.623.000	16.320.405.000	13.605.000.000	15.740.350.000	15.902.000.000	-	16.087.238.683	17.003.766.300	19.491.816.650	17.521.385.995	-		83,81	104,19	143,27	111,32	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		9.420.973.000	8.646.405.000	6.230.000.000	6.200.000.000	6.200.000.000	-	5.280.069.583	6.986.978.100	7.577.713.550	8.158.794.875	-		56,05	80,81	121,63	131,59	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		2.000.000.000	2.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	-	3.612.084.283	4.506.371.800	4.401.596.650	4.851.803.800	-		180,60	225,32	125,76	138,62	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		1.000.000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000		1.714.843.483	3.955.416.500	4.013.172.650	4.525.923.800			171,48	395,54	160,53	181,04	
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		1.897.240.800	550.955.300	388.424.000	325.880.000			189,72	55,10	38,84	32,59	

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		1.649.136.000	849.568.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	-	1.667.985.300	2.480.606.300	3.176.116.900	3.306.991.075	-		101,14	291,98	117,63	122,48	
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				200.000.000	200.000.000	200.000.000		7.472.000		494.288.700	418.147.500			#DIV/0!	#DIV/0!	247,14	209,07	
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1.649.136.000	849.568.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000		1.660.513.300	2.480.606.300	2.681.828.200	2.888.843.575			100,69	291,98	107,27	115,55	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam daerah kabupaten/Kota			25.000.000	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			25.000.000	30.000.000										#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lainnya		5.771.837.000	5.771.837.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain		5.771.837.000	5.771.837.000											0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		-	-	7.180.874.000	7.180.874.000	7.180.874.000	-	5.104.744.400	6.963.045.100	5.732.694.900	5.813.659.925	-		#DIV/0!	#DIV/0!	79,83	80,96	
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				7.180.874.000	7.180.874.000	7.180.874.000		5.104.744.400	6.963.045.100	5.732.694.900	5.813.659.925			#DIV/0!	#DIV/0!	79,83	80,96	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		7.652.650.000	6.145.000.000	5.695.000.000	7.816.350.000	7.981.000.000	-	7.425.732.100	7.495.881.800	10.430.509.400	6.875.803.500	-		97,03	121,98	183,15	87,97	
Pengembangan Prasarana Pertanian					40.000.000	20.000.000	-	-	-	145.500.000	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					20.000.000	20.000.000				145.500.000				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					20.000.000									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Pembangunan Prasarana Pertanian		7.622.650.000	6.115.000.000	5.660.000.000	7.736.350.000	7.921.000.000	-	7.398.019.000	7.468.131.800	10.254.989.800	6.851.453.100	-		97,05	122,13	181,18	88,56	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		2.472.500.000	1.986.000.000					2.171.750.000	2.331.410.700					87,84	117,39	#DIV/0!	#DIV/0!	

6

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				1.986.000.000	2.217.000.000	2.371.000.000				1.422.320.100	1.435.840.400			#DIV/0!	#DIV/0!	71,62	64,77	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		5.100.150.000	2.958.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000		4.308.000.000	5.136.721.100	5.852.723.800	5.349.097.700			84,47	173,66	195,09	178,30	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan			500.000.000											#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan					550.000.000	350.000.000				2.649.945.900				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya			671.000.000	674.000.000		1.100.000.000					66.515.000			#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		50.000.000				1.100.000.000		918.269.000		330.000.000				1.836,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas					1.969.350.000									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		30.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	-	27.713.100	27.750.000	30.019.600	24.350.400	-		92,38	92,50	85,77	60,88	
Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		30.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000		27.713.100	27.750.000	30.019.600	24.350.400,00			92,38	92,50	85,77	60,88	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		212.000.000	153.000.000	168.000.000	172.000.000	172.000.000								0,00	0,00	0,00	0,00	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam daerah kabupaten/kota		20.000.000	-	-	-	-	-	15.797.100	-	-	-	-		78,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis		20.000.000						15.797.100						78,99	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-		#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	

4

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan			5.000.000											#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				5.000.000	5.000.000	5.000.000								#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		90.000.000	54.000.000	101.000.000	61.000.000	61.000.000	-	266.976.704	558.544.404	798.837.500	93.383.600	-		296,64	1.034,34	790,93	153,09	
Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				40.000.000					240.000.000					#DIV/0!	#DIV/0!	600,00	#DIV/0!	
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		90.000.000	54.000.000	61.000.000	61.000.000	61.000.000		266.976.704	558.544.404	558.837.500	93.383.600			296,64	1.034,34	916,13	153,09	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		102.000.000	94.000.000	102.000.000	95.000.000	95.000.000	-	98.587.204	-	105.079.800	66.649.000	-		96,65	0,00	103,02	70,16	
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		102.000.000	94.000.000	102.000.000	95.000.000	95.000.000		98.587.204		105.079.800,00	66.649.000			96,65	0,00	103,02	70,16	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		150.000.000	108.000.000	119.000.000	122.000.000	122.000.000	-	146.650.000	539.367.900	115.990.200	154.209.400	-		97,77	499,41	97,47	126,40	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		150.000.000	108.000.000	119.000.000	122.000.000	122.000.000	-	146.650.000	539.367.900	115.990.200	154.209.400	-		97,77	499,41	97,47	126,40	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		150.000.000	108.000.000	119.000.000	122.000.000	122.000.000		146.650.000	539.367.900	115.990.200	154.209.400			97,77	499,41	97,47	126,40	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		25.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	24.843.600	15.757.000	-	10.680.000			99,37	87,54	0,00	53,40	
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		25.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	24.843.600	15.757.000	-	10.680.000			99,37	87,54	0,00	53,40	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		25.000.000	18.000.000					24.843.600	15.757.000					99,37	87,54	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				20.000.000	20.000.000	20.000.000					10.680.000			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	53,40	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1.759.000.000	1.268.000.000	1.393.000.000	1.430.000.000	1.427.000.000	-	3.234.787.000	1.981.538.500	1.367.603.500	2.332.578.220			183,90	156,27	98,18	163,12	

2

Uraian	Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah						Rasio Anggaran Renstra Perangkat Daerah (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1.759.000.000	1.268.000.000	1.393.000.000	1.430.000.000	1.427.000.000	-	3.234.787.000	1.981.538.500	1.367.603.500	2.332.578.220	-		183,90	156,27	98,18	163,12	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		440.621.200	491.976.000	500.000.000	510.000.000	510.000.000		388.163.000	222.154.100	393.392.400	1.357.814.000			88,09	45,16	78,68	266,24	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		518.378.800	436.024.000	743.000.000	755.000.000	737.000.000		446.624.000	819.014.000	888.731.100	904.104.220			86,16	187,84	119,61	119,75	
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			200.000.000											#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pembentukan Badan Usaha Milik Petani			15.000.000						15.000.000					#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani				20.000.000	25.000.000	30.000.000					12.270.000			#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	49,08	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota		800.000.000	125.000.000	130.000.000	140.000.000	150.000.000		2.400.000.000	925.370.400	85.480.000	58.390.000			300,00	740,30	65,75	41,71	

2

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah menunjukkan berbagai capaian penting dalam pelaksanaan urusan ketahanan pangan dan pertanian. Berdasarkan data indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, dapat disampaikan beberapa poin analisis sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja
Capaian Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menunjukkan tren yang terus meningkat dari 55,67 pada tahun 2020 menjadi 73,30 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam aspek tata kelola, efisiensi pelaksanaan program, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
2. Perbaikan Akses dan Konsumsi Pangan
Indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengalami penurunan dari 16,51% (2020) menjadi 11,51% (2024). Ini menunjukkan bahwa program-program yang diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses pangan telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama dalam menurunkan tingkat kerawanan pangan.
3. Fluktuasi Produksi Pertanian
Kinerja produksi pertanian, khususnya pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Misalnya, persentase peningkatan produksi hortikultura sempat mencapai angka tinggi (217,27%) pada 2023, namun kembali mengalami penurunan drastis (-11,95%) di tahun 2024. Hal serupa juga terjadi pada produksi tanaman pangan dan perkebunan yang tidak stabil. Hal ini mencerminkan adanya tantangan di tingkat teknis dan eksternal seperti iklim, serangan hama, serta ketergantungan pada pola tanam musiman yang tidak selalu konsisten.
4. Stabilitas Pangan dan Gizi Masyarakat
Angka kecukupan energi dan protein menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, meskipun masih berada dalam ambang batas yang layak. Pada 2020, angka kecukupan energi tercatat 1992,8 kkal/kapita/hari, dan menurun menjadi 1896,62 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kualitas konsumsi pangan masyarakat, bukan hanya dari sisi kuantitas tetapi juga aspek gizi seimbang.
5. Produksi Komoditas Utama
Beberapa komoditas utama seperti padi dan cabai mengalami peningkatan produksi pada tahun-tahun terakhir, namun komoditas lain seperti jagung, biofarmaka, kelapa, dan durian justru mengalami penurunan. Penurunan yang konsisten pada produksi jagung dari 19.616 ton (2020) menjadi 6.635 ton (2024) perlu menjadi perhatian khusus, mengingat jagung merupakan salah satu komoditas pangan strategis.
6. Populasi Ternak dan Penyakit Hewan
Populasi ternak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 100.431 ST pada 2020 menjadi 117.322 ST pada 2024. Namun demikian, jumlah kasus penyakit hewan menular strategis meningkat signifikan pada 2022 (472 kasus) dan masih cukup tinggi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan masih perlunya penguatan sistem pengawasan, vaksinasi, dan biosekuriti untuk mengendalikan penyakit hewan.
7. Teknologi Pertanian dan Kapasitas Petani
Indikator penerapan teknologi pertanian dan peningkatan kapasitas kelompok tani menunjukkan tren positif. Penerapan teknologi meningkat dari 8,40% pada tahun 2020 menjadi 15,01% di tahun 2024.

Sementara itu, kapasitas kelompok tani juga meningkat dari skor 204 menjadi 239. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kompetensi petani dan adaptasi terhadap teknologi yang mendorong efisiensi usaha tani.

8. Ketersediaan Cadangan Pangan dan Ketahanan Saat Krisis

Indikator ketersediaan cadangan pangan (beras/ jagung) menunjukkan capaian yang masih rendah, dengan nilai yang tidak konsisten dan sempat turun menjadi 0,44% pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan kerentanan dalam ketahanan pangan saat terjadi krisis atau bencana, dan perlu menjadi prioritas kebijakan ke depan.

Secara umum, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah berhasil mencatat sejumlah capaian positif, terutama dalam hal tata kelola, peningkatan akses pangan, dan peningkatan kapasitas petani. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, seperti ketidakstabilan produksi pertanian, rendahnya cadangan pangan, dan meningkatnya penyakit hewan menular.

Tabel 2.3
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Urusan Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indikator Tujuan							
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	55,67	59,40	66,00	71,14	73,30	
	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Angka	16,51	15,87	16,57	14,71	11,51	
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%		-8,52	-11,02	16,60	-1,07	
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%		66,41	-76,12	217,27	-11,95	
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%		-11,49	-0,81	0,96	-8,87	
	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%		6,59	45,89	28,98	2,04	
2	Indikator Sasaran							
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	55,67	59,40	66,00	71,14	73,30	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	85,90	90,60	91,10	89,40	90,42	
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%		-8,52	-11,02	16,60	-1,07	
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%		66,41	-76,12	217,27	-11,95	
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%		-11,49	-0,81	0,96	-8,87	
	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%		6,59	45,89	28,98	2,04	
3	Indikator Program							
	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	
	Rasio Lumbung Pangan Aktif	%					2,29	
	Angka Kecukupan Energi	kcal/ kapita/ hari	1992,8	1986,7	1828,6	1866	1896,62	
	Angka Kecukupan Protein	gram/ kap/ hari	57,90	56,2	54,60	55,7	55,08	
	Persentase penanganan desa rentan rawan pangan	%					2,29	
	Persentase Pangan Segar Aman	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah Produksi Padi	Ton/ tahun	367.305	365.352	338.084	399.915	390.600	
	Jumlah Produksi Jagung	Ton/ tahun	19.616	14.985	6.667	7.395	6.635	
	Jumlah Produksi Cabai	Ton/ tahun	1.307	4.937	2.339	3.076	3.251	
	Jumlah Produksi Durian	Ton/ tahun	3.587	6.983	7.201	10.058	5.880	
	Jumlah Produksi Biofarmaka	Ton/ tahun	9.301	12.553	9.584	6.607	4.464	
	Jumlah Produksi Kelapa	Ton/ tahun	44.172	39.809	41.288	40.335	36.752	
	Jumlah Produksi Kopi	Ton/ tahun	171	169	187	176	165	
	Jumlah Produksi Tembakau	Ton/ tahun	248	130	78	363	292	
	Jumlah Populasi Ternak	ST/ tahun	100.431	105.623	109.453	111.772	117.322	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Tahun					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase pemanfaatan penyediaan prasarana pertanian	%	100	100	100	100	100	
	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Kasus	0	0	472	365	306	
	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	100	100	100	
	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	%	8,40	9,32	14,40	15,80	15,01	
	Peningkatan kapasitas kelompok tani	Skor	204	208	218	224	239	
4	Indikator Kinerja Kunci							
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	-	3,34	0,44	-	5,55	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ ha	-	6,77	6,91	6,87	6,90	
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-	130,77	2,21	-15,44	-16,14	

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dalam pengembangan pelayanan untuk menghasilkan produk pangan yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan diantaranya adalah peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, industrialisasi dan hilirisasi sektor non pangan serta perubahan iklim dan gas rumah kaca. Kondisi ini perlu disikapi secara bijak karena produksi dan produktivitas sektor pangan sebagai penopang ketahanan pangan yang didukung oleh infrastruktur dan distribusi yang merata.

Peluang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam pengembangan pelayanan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi yang hal ini sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Purworejo dalam konstelasi kewilayahan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai kawasan swasembada pangan, air, dan energi Dieng-Serayu-Bogowonto yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo.

Dilihat dari aspek geografi, Kabupaten Purworejo memiliki keunggulan kompetitif berupa ketersediaan lahan pertanian yang relatif subur dan luas ditopang oleh sistem irigasi teknis seperti Daerah Irigasi Wadaslintang serta dukungan dari proyek Bendungan Bener yang sedang dibangun. Komoditas utama yang dikembangkan mencakup padi, jagung, kedelai, hortikultura (sayuran dan buah-buahan), serta komoditas perkebunan rakyat seperti kelapa dan kakao. Selain itu, sektor peternakan yang berpotensi dikembangkan dengan pemanfaatan limbah pertanian yang ada.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mencakup seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di daerah. Sasaran utama meliputi pelaku utama sektor pertanian seperti petani, peternak, pekebun, nelayan, dan rumah tangga tani yang secara langsung berperan dalam produksi pangan. Selain itu, kelompok dan kelembagaan tani, antara lain Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), koperasi, serta lembaga ekonomi petani juga menjadi sasaran layanan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan usaha. Pelaku usaha dan UMKM di bidang pangan dan pertanian, termasuk pengolah, pedagang, serta penyedia sarana dan prasarana produksi, turut menjadi bagian penting dalam rantai layanan yang disediakan. Masyarakat luas sebagai konsumen juga menjadi penerima manfaat dari upaya terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Di samping itu, perangkat daerah terkait, lembaga pendidikan, dan mitra strategis lainnya diposisikan sebagai kelompok sasaran pendukung yang berperan dalam memperkuat sinergi pembangunan. Dengan penetapan kelompok sasaran tersebut, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memegang peranan penting dalam penyediaan pelayanan publik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan pengembangan sektor

pertanian. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, terdapat sejumlah permasalahan pelayanan yang berdampak pada efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut ini adalah penjabaran permasalahan pelayanan yang dihadapi:

1. Konsumsi pangan masyarakat yang kurang beragam, bergizi, aman, dan seimbang

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat keberagaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penyuluhan gizi yang efektif dan pembinaan terhadap pola konsumsi pangan yang sehat dan seimbang. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keamanan pangan turut memperburuk kondisi ini. Permasalahan ini menunjukkan masih belum optimalnya pelayanan informasi dan edukasi dari Dinas kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

2. Penanganan kerawanan pangan yang belum komprehensif

Penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Purworejo masih belum berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi. Koordinasi antarinstansi terkait dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanganan masalah ini masih kurang maksimal. Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi kerawanan pangan yang ada belum berjalan secara optimal, sehingga respons terhadap kerentanan pangan di tingkat komunitas masih kurang cepat dan tepat sasaran. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas dan sinergi pelayanan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam menangani kerawanan pangan secara komprehensif.

Penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Purworejo juga menghadapi tantangan signifikan yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem distribusi pangan. Meskipun secara kuantitatif ketersediaan pangan di daerah relatif mencukupi, ketidakefisienan dan ketidakteraturan dalam proses distribusi menyebabkan sebagian wilayah dan kelompok masyarakat tetap mengalami kesulitan akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau.

Kendala dalam distribusi pangan ini meliputi infrastruktur yang belum memadai, seperti jaringan transportasi yang kurang lancar di beberapa wilayah, keterbatasan sarana penyimpanan dan pengelolaan pangan, serta lemahnya koordinasi antar pelaku dalam rantai pasok pangan. Akibatnya, pangan yang tersedia di sentra produksi sulit tersalurkan secara merata ke daerah-daerah yang rentan kerawanan pangan, sehingga menimbulkan disparitas akses dan meningkatkan risiko kekurangan pangan di tingkat rumah tangga.

3. Ketersediaan pangan surplus namun cenderung menurun

Meskipun secara kuantitatif Kabupaten Purworejo memiliki ketersediaan pangan yang surplus, data menunjukkan adanya tren penurunan produksi pangan yang dapat mengancam ketahanan pangan jangka panjang. Permasalahan pelayanan terkait diantaranya adalah kurang optimalnya pendataan dan perencanaan produksi pangan serta belum efektifnya pengendalian stok dan cadangan pangan oleh Dinas. Selain itu, belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau ketersediaan dan kebutuhan pangan secara real-time menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

4. Menurunnya produksi pertanian

Produksi pertanian yang menurun menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Permasalahan pelayanan yang muncul terkait dengan hal ini adalah keterbatasan pendampingan

teknis kepada petani, rendahnya akses terhadap teknologi pertanian modern, serta belum optimalnya fasilitasi dukungan input produksi seperti benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya. Selain itu, koordinasi pelayanan dengan sektor terkait juga masih perlu diperkuat untuk mengatasi berbagai kendala yang menghambat peningkatan produksi.

5. Rantai pasok pertanian yang panjang

Rantai pasok pertanian yang panjang dan kurang efisien menyebabkan tingginya biaya distribusi dan menurunnya daya saing produk pertanian lokal. Permasalahan pelayanan yang terkait adalah kurangnya fasilitasi Dinas dalam membangun jaringan pemasaran yang efektif dan mempersingkat jalur distribusi. Kurangnya dukungan terhadap pengembangan infrastruktur logistik serta minimnya pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rantai nilai pertanian turut menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok.

6. Minimnya pengelolaan hasil pertanian

Pengelolaan hasil pertanian yang masih minim menyebabkan rendahnya nilai tambah produk dan terjadinya pemborosan hasil panen. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian belum memberikan pelayanan optimal dalam bentuk pelatihan pengolahan hasil, fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen, serta dukungan pengembangan agroindustri skala kecil dan menengah. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan petani dan pelaku usaha dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang bernilai jual lebih tinggi.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo di atas menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan efektivitas dalam berbagai bidang, mulai dari penyuluhan, pendampingan teknis, manajemen data, hingga fasilitasi pengembangan usaha pertanian. Upaya perbaikan pelayanan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan masyarakat sangat diperlukan untuk mendorong tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Purworejo.

2.2.2. Isu Strategis

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, dilakukan identifikasi dan analisis terhadap potensi, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam lingkup kewenangannya. Proses ini mempertimbangkan keterkaitan antara aspek internal (potensi dan permasalahan sektoral) serta aspek eksternal (isu lingkungan hidup strategis dan dinamika global, nasional, dan regional), guna merumuskan isu strategis yang tepat dan relevan untuk dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Penetapan isu strategis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik berdasarkan lima komponen utama:

1. Potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah
2. Permasalahan daerah yang dihadapi
3. Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
4. Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional, dan Regional)
5. Sintesis permasalahan menjadi isu strategis Perangkat Daerah

Melalui pendekatan ini, dihasilkan rumusan isu strategis yang mencerminkan kebutuhan intervensi kebijakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis terhadap tabel data yang memuat berbagai aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi sektor ketahanan

pangan dan pertanian, maka ditetapkan dua isu strategis utama sebagai berikut:

1. Tingginya Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Meskipun Kabupaten Purworejo memiliki potensi sumber daya pangan yang cukup melimpah, tingkat konsumsi pangan masyarakat masih menunjukkan ketidakcukupan, baik dari segi keragaman, kandungan gizi, keamanan, maupun keseimbangan. Permasalahan ini berdampak langsung pada kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, yang menjadi kunci dalam memanfaatkan momentum bonus demografi. Dalam konteks isu global, fenomena aging population di negara maju mengingatkan akan pentingnya penguatan kualitas SDM sejak dini. Sementara pada skala nasional, transformasi sosial menuntut peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan berkualitas. Oleh karena itu, isu ini ditetapkan sebagai isu strategis prioritas.

Ketersediaan pangan di Purworejo secara agregat tergolong surplus, namun terdapat kecenderungan penurunan, serta belum meratanya distribusi dan akses pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kerawanan pangan belum dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Isu ini erat kaitannya dengan urgensi pengembangan kawasan swasembada pangan, air, dan energi sebagai bagian dari strategi adaptif terhadap perubahan iklim dan kondisi sosial ekonomi yang dinamis. Penguatan sistem distribusi pangan, early warning system kerawanan pangan, dan pengembangan cadangan pangan lokal menjadi solusi yang perlu diprioritaskan.

2. Menurunnya Daya Saing Sektor Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, namun saat ini menghadapi tantangan serius berupa penurunan produksi, panjangnya rantai pasok, serta rendahnya nilai tambah hasil pertanian akibat minimnya pengelolaan pasca panen.

Permasalahan ini mengindikasikan belum optimalnya peran sektor pertanian dan pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam skala nasional, strategi hilirisasi mulai menunjukkan dampak positif, namun belum sepenuhnya dirasakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, isu menurunnya daya saing sektor pertanian menjadi isu strategis yang membutuhkan intervensi terintegrasi dalam bentuk modernisasi pertanian, efisiensi rantai nilai, dan penguatan agroindustri lokal.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dalam dokumen Rencana Strategis lima tahunan. Dengan penetapan isu strategis yang berbasis data dan kontekstual, diharapkan perencanaan pembangunan sektor pangan dan pertanian dapat lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.4.
Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Bonus Demografi	Konsumsi Pangan Masyarakat yang Kurang Beragam dan Bergizi, Aman, Seimbang	Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	<i>Aging population</i> negara maju	Transformasi sosial	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan
	Penanganan Kerawanan Pangan Belum Komprehensif					
Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi	Ketersediaan pangan surplus namun cenderung menurun					
Potensi Pertanian dan Pariwisata	Menurunnya Produksi Pertanian	Belum optimalnya ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata	Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia	Transformasi ekonomi	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Menurunnya daya saing sektor pertanian
	Rantai Pasok Pertanian Panjang					
	Minimnya Pengelolaan Hasil Pertanian					

2

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Selaras dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mendukung misi satu yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan Sejahtera, khususnya melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia bidang pertanian, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Peningkatan ini akan berdampak pada nilai sosial ekonomi yang berkorelasi terhadap misi Bupati dan Wakil Bupati yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan.

Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang melakukan pembinaan dan pendampingan pada masyarakat petani yang merupakan penggerak perekonomian daerah, dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Misi Bupati dan Wakil Bupati yang keempat menyebutkan adanya peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal, disinilah peran serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkontribusi mendukung pencapaian misi kepala Daerah melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian mulai dari hulu sampai hilir.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Selama lima tahun kedepan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tujuan meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Selaras dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, Dan Inovatif (Purworejo Berseri)

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti arah kebijakan pembangunan daerah di sektor pangan dan pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan sejumlah sasaran strategis yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan selama periode lima tahun ke depan. Sasaran strategis yang dirumuskan bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan perangkat daerah.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah yang berbasis pada sektor unggulan yang disertai peningkatan kapasitas ekosistem riset dan inovasi	Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Produksi tanaman pangan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
			Persentase Peningkatan Produksi hortikultura	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
			Persentase Peningkatan Produksi perkebunan	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		
			Persentase Peningkatan Produksi Daging	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
Menurunnya ketidakcukupan konsumsi pangan			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	11,30	11,00	10,80	10,50	10,23	10,00		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20		
			Meningkatnya produksi pertanian	Persentase Peningkatan Produksi tanaman pangan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
				Persentase Peningkatan Produksi hortikultura	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	
		Persentase Peningkatan Produksi perkebunan		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		
		Persentase Peningkatan Produksi Daging		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
		Meningkatnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	90,73	91,70	92,00	92,50	93,00	93,50		
			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	
Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah											

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana tindakan yang komprehensif dan terstruktur yang memuat langkah-langkah serta upaya-upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam periode tersebut. Strategi ini dirancang sebagai respons terhadap dinamika lingkungan eksternal dan internal yang terus berkembang, dengan tujuan memastikan keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam strategi ini, optimalisasi sumber daya menjadi salah satu fokus utama, mencakup pemanfaatan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta teknologi secara efisien dan efektif. Melalui pengelolaan sumber daya yang optimal, diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penetapan tahapan pelaksanaan juga menjadi bagian integral dari strategi ini, dengan penyusunan rencana kerja yang jelas dan sistematis agar setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat terlaksana secara berurutan dan terukur. Tahapan tersebut dirancang untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul seiring perubahan lingkungan yang dinamis, sehingga memungkinkan penyesuaian yang cepat dan tepat. Fokus strategi diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi, sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah secara menyeluruh. Penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan prioritas strategis, dengan memperhatikan potensi, tantangan, serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 3.2.
Penahapan Rentra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kebijakan dan sistem kelembagaan yang mendukung ketahanan pangan	Penguatan produksi pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat	Memperkuat akses pangan melalui rantai pasok yang inklusif	Diversifikasi komoditas pangan lokal untuk stabilitas dan pemanfaatan pangan yang lebih baik	Mewujudkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas
Penguatan rantai pasok komoditas pertanian strategis serta kebijakan yang mendukung pada peningkatan daya saing sektor pertanian	Penguatan sarana dan prasarana pertanian, serta Sumber Daya Manusia untuk efisiensi pada proses produksi	Meningkatkan adopsi teknologi untuk modernisasi pertanian	Optimalisasi kemitraan strategis lintas sektor untuk meningkatkan nilai tambah pada produk hasil pertanian	Terwujudnya daya saing sektor pertanian
Menguatkan Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan kapasitas sumber daya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Memperkuat sinergi dalam Mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perwujudan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

1. Urusan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas strategis yang memerlukan perencanaan jangka menengah secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai kondisi ketahanan pangan yang kokoh dan berkeadilan, telah disusun pentahapan program dan kebijakan selama periode renstra, yang terdiri dari lima tahapan utama. Setiap tahapan memiliki fokus strategis yang saling mendukung, dimulai dari penguatan kelembagaan hingga perwujudan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat secara kuantitas dan kualitas.

a. Tahap I – Tahun 2026: Penguatan Kebijakan dan Sistem Kelembagaan

Tahap awal pembangunan diarahkan pada penguatan kebijakan dan sistem kelembagaan yang mendukung ketahanan pangan. Hal ini menjadi fondasi penting untuk memastikan tersedianya kerangka regulasi, kelembagaan, serta tata kelola yang solid dalam mengarahkan pembangunan pangan. Penataan regulasi, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta pembentukan kelembagaan pangan yang efektif menjadi kunci utama dalam tahap ini.

b. Tahap II – Tahun 2027: Penguatan Produksi Pangan Lokal

Setelah sistem kelembagaan diperkuat, fokus pada tahun kedua diarahkan kepada penguatan produksi pangan lokal. Tahap ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produksi melalui pemanfaatan sumber daya lokal, penyediaan sarana produksi, penguatan kelembagaan petani, serta dukungan teknologi pertanian. Tujuannya adalah agar kebutuhan konsumsi pangan masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri dan berkelanjutan dari potensi pangan lokal.

c. Tahap III – Tahun 2028: Penguatan Akses Pangan melalui Rantai Pasok yang Inklusif

Pada tahap ketiga, strategi difokuskan pada penguatan akses pangan melalui pembangunan rantai pasok yang inklusif dan efisien. Hal ini mencakup perbaikan sistem distribusi pangan, pembangunan infrastruktur pendukung (seperti gudang, pasar, dan transportasi), serta pelibatan seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM dan koperasi. Tujuannya agar pangan yang diproduksi dapat tersedia secara merata, terjangkau, dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

d. Tahap IV – Tahun 2029: Diversifikasi Komoditas Pangan Lokal

Memasuki tahap keempat, fokus diarahkan pada diversifikasi komoditas pangan lokal untuk mendukung stabilitas dan pemanfaatan pangan yang lebih baik. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan utama (seperti beras), dengan mengembangkan pangan sumber karbohidrat, protein, dan nutrisi lainnya dari potensi lokal. Strategi ini juga mendorong pemanfaatan pangan alternatif dan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produk.

e. Tahap V – Tahun 2030: Mewujudkan Ketercukupan Konsumsi Pangan

Tahap akhir pembangunan ditujukan untuk mewujudkan ketercukupan konsumsi pangan masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Pada tahap ini diharapkan seluruh sistem yang telah dibangun mulai dari kebijakan, produksi, distribusi, hingga konsumsi telah berfungsi secara optimal. Fokus diberikan pada peningkatan konsumsi pangan bergizi seimbang,

penguatan program edukasi gizi masyarakat, serta pemantapan ketahanan pangan rumah tangga.

Kelima tahapan ini saling terintegrasi dan membentuk kerangka kerja strategis yang komprehensif dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan bertahap, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih adaptif dalam merespons tantangan serta mampu mencapai tujuan akhir, yaitu terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas.

2. Urusan Pertanian

Peningkatan daya saing sektor pertanian merupakan bagian penting dari agenda pembangunan jangka menengah daerah, mengingat peran strategis sektor ini dalam mendukung ketahanan pangan, perekonomian lokal, serta kesejahteraan petani. Untuk mencapai daya saing pertanian yang berkelanjutan, disusunlah strategi melalui lima tahapan bertahap dan terintegrasi dalam dokumen Renstra. Masing-masing tahapan dirancang untuk memperkuat elemen-elemen kunci yang menjadi fondasi pertanian modern dan kompetitif.

a. Tahap I – Tahun 2026: Penguatan Rantai Pasok dan Kebijakan Pendukung

Pada tahap awal, fokus diarahkan pada penguatan rantai pasok komoditas pertanian strategis serta pengembangan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing. Tujuan utama pada fase ini adalah membangun sistem logistik dan distribusi pertanian yang efisien, transparan, dan terintegrasi dari hulu ke hilir, serta menyusun kerangka regulasi dan kebijakan yang kondusif untuk investasi, perdagangan, dan inovasi di sektor pertanian.

b. Tahap II – Tahun 2027: Penguatan Sarana, Prasarana, dan SDM

Setelah fondasi kebijakan dan rantai pasok diperkuat, tahap selanjutnya menitikberatkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian, seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan alat mesin pertanian (alsintan). Sejalan dengan itu, dilakukan pula penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya petani dan penyuluh, melalui pelatihan teknis dan manajerial untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan manajemen usaha tani.

c. Tahap III – Tahun 2028: Meningkatkan Adopsi Teknologi Pertanian

Tahap ketiga berfokus pada peningkatan adopsi teknologi modern di sektor pertanian, termasuk penerapan pertanian presisi, digitalisasi pertanian, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Inovasi teknologi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, serta ketahanan terhadap perubahan iklim dan gangguan eksternal. Pendampingan, insentif, dan kemitraan dengan penyedia teknologi akan menjadi bagian penting dari strategi ini.

d. Tahap IV – Tahun 2029: Optimalisasi Kemitraan Strategis Lintas Sektor

Tahap keempat menekankan pada penguatan dan optimalisasi kemitraan lintas sektor, baik dengan pelaku usaha, BUMDes, koperasi, swasta, perguruan tinggi, maupun lembaga penelitian. Tujuannya adalah untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian, memperluas akses pasar, serta membangun ekosistem agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan.

- e. Tahap V – Tahun 2030: Terwujudnya Daya Saing Sektor Pertanian
Tahap akhir merupakan fase konsolidasi dan pencapaian, di mana seluruh upaya yang telah dilakukan diarahkan untuk mewujudkan sektor pertanian yang berdaya saing tinggi. Ciri utamanya adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian, efisiensi sistem produksi, kuatnya jaringan pasar, tingginya adopsi teknologi, dan keterlibatan aktif berbagai pihak dalam pengembangan pertanian daerah.

Melalui lima tahapan strategis ini, sektor pertanian Kabupaten dapat berkembang dari sistem tradisional menuju sistem pertanian modern, efisien, dan adaptif terhadap dinamika global. Daya saing sektor pertanian bukan hanya ditentukan oleh hasil produksi semata, tetapi juga oleh kualitas sistem pendukung, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta kapasitas kelembagaan dan SDM yang mengelolanya.

3. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel merupakan landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi salah satu fokus strategis dalam dokumen renstra. Untuk mencapai hal tersebut, disusunlah lima tahapan berkelanjutan yang saling mendukung dan membentuk proses penguatan kelembagaan dan tata kelola kinerja yang sistematis dan berorientasi hasil.

- a. Tahap I – Tahun 2026: Memperkuat Sistem Manajemen Kinerja yang Efektif

Tahap pertama merupakan fondasi dari seluruh proses, yaitu dengan memperkuat sistem manajemen kinerja perangkat daerah. Fokus diarahkan pada penataan struktur, prosedur, serta alat ukur kinerja yang selaras dengan perencanaan pembangunan. Penguatan ini mencakup perbaikan perencanaan kinerja, pelaporan, evaluasi, serta sistem informasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

- b. Tahap II – Tahun 2027: Meningkatkan Komitmen Perangkat Daerah

Setelah sistem manajemen kinerja diperkuat, tahap berikutnya adalah peningkatan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas secara konsisten. Ini mencakup internalisasi nilai akuntabilitas di seluruh tingkatan organisasi, penguatan kepemimpinan birokrasi, dan penegakan integritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

- c. Tahap III – Tahun 2028: Memantapkan Kapasitas Sumber Daya
Pada tahap ketiga, strategi difokuskan pada pemantapan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan untuk mendukung sistem kinerja yang telah dibangun. Ini dilakukan melalui peningkatan kompetensi ASN, penyusunan standar kinerja individu dan unit kerja, serta penguatan peran pengawas internal dalam menjaga mutu pelaksanaan kinerja.

- d. Tahap IV – Tahun 2029: Memperkuat Sinergi dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Tahap keempat diarahkan pada penguatan sinergi lintas perangkat daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja secara kolektif. Kolaborasi dan integrasi antar unit kerja menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berjalan selaras dan saling

mendukung. Termasuk di dalamnya adalah sinergi antara pengelola program, keuangan, dan evaluasi.

e. Tahap V – Tahun 2030: Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tahap akhir merupakan puncak dari seluruh proses, yaitu terwujudnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tahap ini, seluruh perangkat daerah diharapkan telah memiliki budaya kinerja yang kuat, sistem evaluasi yang transparan, serta kemampuan untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja kepada publik secara terbuka dan berbasis data.

Kelima tahapan ini membentuk kerangka strategis yang terintegrasi untuk menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel, responsif, dan profesional. Akuntabilitas bukan hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan komitmen kolektif dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

Arah kebijakan renstra perangkat daerah mengacu pada beberapa prinsip utama. Pertama, operasionalisasi NSPK diwujudkan melalui penyelarasan dengan sasaran-sasaran strategis yang tercantum dalam RPJMD, khususnya yang relevan dan sejalan dengan kewenangan perangkat daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah tetap berada dalam koridor kebijakan nasional maupun daerah.

Kedua, arah kebijakan Renstra PD disusun dengan menyesuaikan secara langsung terhadap arah kebijakan RPJMD. Meskipun redaksionalnya bersifat operasional dan lebih teknis, substansi arah kebijakan Renstra harus konsisten dan tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah secara keseluruhan.

Ketiga, dalam proses penyusunannya, perangkat daerah wajib memperhatikan penahapan strategi dalam dokumen Renstra, agar kebijakan yang dirancang tidak hanya responsif terhadap isu aktual, tetapi juga mencerminkan perencanaan yang berkelanjutan, terukur, dan realistis.

Dengan demikian, arah kebijakan renstra merupakan perangkat penting yang memastikan bahwa setiap langkah operasional perangkat daerah tidak hanya sesuai dengan tugas dan fungsinya, tetapi juga selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Tabel 3.5.
Arah Kebijakan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PANGAN				
1	S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat	Penguatan kebijakan dan sistem kelembagaan yang mendukung ketahanan pangan melalui aktivitas: 1. Penyusunan dan revisi kebijakan pangan daerah 2. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan 3. Pengembangan sistem pemantauan ketahanan pangan terpadu 4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah 5. Peningkatan sinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat	TAHUN 2026
2		Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat	Penguatan produksi pangan lokal untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan Masyarakat melalui aktivitas: 1. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan 2. Fasilitasi akses sarana dan prasarana produksi 3. Penguatan kelembagaan Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani 4. Diversifikasi produksi pangan non beras 5. Pemanfaatan lahan pekarangan	TAHUN 2027
3		Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat	Memperkuat akses pangan melalui rantai pasok yang inklusif melalui aktivitas: 1. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan 2. Fasilitasi kemitraan antara petani, pengolah dan pedagang 3. Pengembangan sistem informasi dan teknologi pasar pangan 4. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam manajemen rantai pasok 5. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung rantai pasok inklusif 6. Penyelenggaraan pasar tani	TAHUN 2028
4		Perwujudan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat	Diversifikasi komoditas pangan lokal untuk stabilitas dan pemanfaatan pangan yang lebih baik melalui aktivitas: 1. Pengembangan dan promosi komoditas pangan lokal alternatif 2. Pelatihan dan pendampingan teknologi budidaya diversifikasi pangan 3. Pengembangan produk olahan berbasis pangan lokal diversifikasi 4. Kampanye edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan diversifikasi 5. Fasilitasi akses pasar dan penguatan rantai pasok komoditas diversifikasi	TAHUN 2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6. Pengembangan kebijakan pendukung diversifikasi pangan	
5		Peneguhan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat	Mewujudkan kecukupan konsumsi pangan masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas melalui aktivitas: 1. Peningkatan produksi dan distribusi pangan pokok 2. Bantuan pangan untuk kelompok rentan 3. Kampanye dan edukasi gizi seimbang 4. Peningkatan akses pasar pangan segar dan bergizi 5. Pendampingan dan pelatihan keterampilan memasak dan pengolahan pangan 6. Monitoring dan evaluasi status konsumsi pangan masyarakat	TAHUN 2030
PERTANIAN				
1	S4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Penguatan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.	Penguatan rantai pasok komoditas pertanian strategis serta kebijakan yang mendukung pada peningkatan daya saing sektor pertanian melalui aktivitas: 1. Pengembangan kawasan sentra produksi komoditas strategis 2. Penguatan kelembagaan petani dan pelaku usaha tani 3. Peningkatan kualitas dan standar produk pertanian 4. Penguatan sistem logistik dan rantai distribusi pertanian 5. Digitalisasi rantai pasok dan pasar komoditas pertanian 6. Penyusunan dan harmonisasi kebijakan sektor pertanian yang mendukung daya saing	TAHUN 2026
2		Peningkatan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.	Penguatan sarana dan prasarana pertanian, serta Sumber Daya Manusia untuk efisiensi pada proses produksi melalui aktivitas: 1. Penyediaan sarana pertanian 2. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian 3. Pelatihan teknis dan manajerial bagi petani 4. Penguatan kapasitas penyuluh pertanian 5. Fasilitasi transfer teknologi pertanian 6. Pemberdayaan generasi muda dan wanita di sektor pertanian	TAHUN 2027

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		Pemantapan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.	Meningkatkan adopsi teknologi untuk modernisasi pertanian melalui aktivitas: 1. Sosialisasi dan kampanye penggunaan teknologi pertanian 2. Pengembangan dan penyebaran model pertanian presisi 3. Fasilitasi akses pembiayaan untuk teknologi pertanian 4. Peningkatan infrastruktur digital pertanian 5. Kolaborasi dengan startup dan perusahaan teknologi pertanian	TAHUN 2028
4		Perwujudan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.	Optimalisasi kemitraan strategis lintas sektor untuk meningkatkan nilai tambah pada produk hasil pertanian melalui aktivitas: 1. Identifikasi dan pemetaan potensi mitra strategis 2. Fasilitasi forum dan platform kolaborasi 3. Pengembangan model kemitraan berbasis rantai nilai 4. Fasilitasi akses pembiayaan dan investasi 5. Pengembangan produk bernilai tambah dan branding	TAHUN 2029
5		Peneguhan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian.	Terwujudnya daya saing sektor pertanian melalui aktivitas: 1. Peningkatan produksi dan produktivitas 2. Penguatan infrastruktur pertanian 3. Pengembangan rantai pasok dan akses pasar 4. Pengembangan inovasi dan teknologi 5. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	TAHUN 2030
PENUNJANG URUSAN				
1	S-5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Penguatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2026

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2		Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2027
3		Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Pemantapan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2028
4		Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5		Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Peneguhan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) melalui Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	TAHUN 2030

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan hasil dari proses cascading yang dilakukan secara sistematis dari tujuan dan sasaran organisasi menuju outcome dan output yang diharapkan. Dalam penyusunannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan diidentifikasi dan dirancang dengan merujuk pada kerangka logis yang menghubungkan antara input, proses, dan hasil akhir yang akan dicapai. Proses cascading ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi yang lebih luas, serta memberikan dampak yang nyata dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Daerah.

Setiap elemen dalam struktur Renstra ini tidak hanya bersifat sebagai sekadar rincian administratif, namun juga sebagai bagian integral dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, program, kegiatan, dan sub kegiatan harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja. Dengan demikian, melalui proses cascading ini, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai outcome dan output yang diinginkan.

Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra ini mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini selaras dengan kebijakan yang lebih besar, serta mendukung pencapaian kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penyusunan nomenklatur yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang ada akan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.

Penetapan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S4. Meningkatnya produktivitas, pemerataan dan inklusivitas perekonomian daerah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
					Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura		
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan		
					Persentase Peningkatan Populasi Ternak		
					Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Meningkatnya produksi pertanian			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
					Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura		
					Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan		
					Persentase Peningkatan Populasi Ternak		
		Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis			Jumlah Produksi Padi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah Produksi Jagung		
					Jumlah Produksi Cabai		
					Jumlah Produksi Durian		
					Jumlah Produksi Biofarmaka		
					Jumlah Produksi Kelapa		
					Jumlah Produksi Kopi		
					Jumlah Produksi Tembakau		
		Meningkatnya populasi ternak			Jumlah Populasi Ternak		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang Dikelola	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	
				Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang Dikelola		
						Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
						Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	
				Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lainnya	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain yang Dilaksanakan	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	
			Termanfaatkannya prasarana pertanian yang disediakan		Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	Pengembangan Prasarana Pertanian	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
				Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	Pembangunan Prasarana Pertanian	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	
						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
				Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing	Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing yang Dikelola	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	
			Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan dan menular strategis		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Terlaksananya Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular	Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular yang Dilaksanakan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	
						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dikelola	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
						Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dilaksanakan	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
			Terlayannya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Fasilitasi Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani			Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
					Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani		
				Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
						Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	
						Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat			Skor Pola Pangan Harapan		
			Meningkatnya rasio lumbung pangan aktif		Rasio Lumbung Pangan Aktif	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
				Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota yang Disediakan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
			Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein		Angka Kecukupan Energi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
					Angka Kecukupan Protein		
				Tersusunnya Dokumen Ketersediaan Pangan	Dokumen Ketersediaan Pangan yang Disusun	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
						Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	
						Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
						Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya penanganan desa rentan rawan pangan		Persentase penanganan desa rentan rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Disediakan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
						Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Tertanganinya Kerawanan Pangan	Kerawanan Pangan yang Ditangani	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	
		Meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan			Persentase Pangan Segar Aman	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Tersedianya Data Pengawasan Pangan Segar	Data Pengawasan Pangan Segar yang Disediakan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	
						Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	
						Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah		Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

8

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
						Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/ Material	
						Fasilitas Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

6

Dalam penyusunan Renstra ini, daftar program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan disusun untuk periode waktu yang mencakup tahun 2025 hingga tahun 2030. Setiap tahunnya, program dan kegiatan akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan dinamika di tingkat daerah maupun pusat. Rencana jangka panjang ini juga memastikan bahwa setiap tahapan program dan kegiatan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi selama periode tersebut.

Penting untuk ditekankan bahwa program yang direncanakan pada tahun 2030 merupakan bagian integral dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan program untuk tahun 2030 ini bukan hanya merupakan rencana jangka panjang yang terpisah, melainkan merupakan pijakan penting dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2030. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil pada tahun 2025 hingga 2029 dapat memperkuat dasar perencanaan untuk tahun 2030, sehingga terjalin kontinuitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan.

Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Program tahun 2030 menjadi salah satu fondasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode tersebut dapat terus meningkatkan kinerja pemerintahan daerah serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Program merupakan wujud konkret dari visi dan misi yang ingin dicapai oleh instansi atau organisasi. Program berisi sekumpulan kegiatan yang terorganisir dan bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Dalam Renstra, program dijabarkan secara rinci dengan mempertimbangkan prioritas, urgensi, dan dampaknya terhadap tujuan jangka panjang.

Setiap program direncanakan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang ada, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Hal ini bertujuan agar setiap program memiliki relevansi yang tinggi dengan kondisi faktual yang ada di lapangan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat atau pihak yang menjadi sasaran dari program tersebut.

Kegiatan adalah langkah-langkah yang lebih operasional dan spesifik dalam rangka mencapai tujuan dari suatu program. Kegiatan-kegiatan ini biasanya memiliki durasi waktu tertentu, melibatkan berbagai sumber daya, serta melibatkan koordinasi antara berbagai pihak. Kegiatan ini dapat berupa penyuluhan, pelatihan, pembangunan infrastruktur, atau kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan program.

Dalam Renstra, setiap kegiatan disusun dengan merinci jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, serta output yang ingin dicapai. Setiap kegiatan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan program yang lebih besar.

Subkegiatan merupakan rincian lebih lanjut dari kegiatan. Pada level ini, pelaksanaan kegiatan dipastikan dapat dilakukan secara lebih terperinci dengan alokasi sumber daya yang jelas. Subkegiatan umumnya mengandung langkah-langkah yang lebih teknis dan mendetail untuk mendukung kelancaran kegiatan utama.

Penentuan subkegiatan dalam Renstra harus dilakukan dengan teliti, mempertimbangkan berbagai aspek operasional yang ada, serta memberikan ruang bagi evaluasi untuk memastikan bahwa setiap subkegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pendanaan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Tanpa adanya alokasi pendanaan yang jelas dan

memadai, program-program yang direncanakan tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam Renstra, setiap program, kegiatan, dan subkegiatan harus dilengkapi dengan estimasi biaya yang diperlukan.

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan dalam Renstra merupakan bagian integral dari perencanaan yang harus disusun dengan cermat dan rinci. Penyusunan yang baik akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, serta penggunaan sumber daya dan anggaran dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Dengan adanya perencanaan yang matang, diharapkan tujuan jangka panjang dapat tercapai dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Penetapan rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kabupaten Purworejo Tahun 2025 sampai dengan 2030 sebagaimana tertuang pada Tabel 4.2.

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025-2029**

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
1	Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,3	70,45		72,49		75,33		77,76		80,2		80,2			
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	11,51	11		10,8		10,5		10,23		10		10			
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	-1,07	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25			
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-11,95	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25			
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	-8,87	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4			
			Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	2,04	1		1		1		1		1		1			
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73,3	70,45		72,89		75,33		77,76		80,2		80,2			
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
2.09.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						21.215.685.056		21.427.842.000		20.126.934.000		20.126.934.000		20.126.934.000				
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	21.215.685.056	100	21.427.842.000	100	20.126.934.000	100	20.126.934.000	100	20.126.934.000	100	Sekretariat	Kabupaten Purworejo	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	24	37.185.100	24	38.000.000	24	38.000.000	24	38.000.000	24	38.000.000	120			
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	19	22	17.415.800	22	17.500.000	22	17.500.000	22	17.500.000	22	17.500.000	110			
2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	22	3.474.700	22	4.000.000	22	4.000.000	22	4.000.000	22	4.000.000	110			
2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Dokumen	0	1	16.294.600	1	16.500.000	1	16.500.000	1	16.500.000	1	16.500.000	5			
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	100	45	20.244.000.456	45	20.296.142.000	45	19.090.234.000	45	19.020.234.000	45	19.020.234.000	225			
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	178	205	20.236.177.956	205	20.288.142.000	198	19.082.234.000	197	19.012.234.000	192	19.012.234.000	192			
2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	26	44	7.822.500	44	8.000.000	44	8.000.000	44	8.000.000	44	8.000.000	220			
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	100	0		11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	44			
2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	44			
2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laporan	100	16	513.200	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	80			
2.09.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	16	513.200	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	80			
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	100	17	460.000	17	46.800.000	20	46.800.000	20	46.800.000	20	46.800.000	94			
2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	17	460.000	17	800.000	17	800.000	17	800.000	17	800.000	85			
2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	0	0	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	11.000.000	3			
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	0	0	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	300			
2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	150			
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	289.058.100	8	297.500.000	8	297.500.000	8	297.500.000	8	297.500.000	40			
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5	2.936.600	6	3.500.000	6	3.500.000	6	3.500.000	6	3.500.000	29			
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	5	3.975.300	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	25			
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	2	184.997.400	2	185.000.000	2	185.000.000	2	185.000.000	2	185.000.000	10			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	4	8.400.000	4	8.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000	4	8.500.000	20			
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	4	5	5.937.800	5	6.500.000	5	6.500.000	5	6.500.000	5	6.500.000	25			
2.09.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	1.800.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	60			
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	74.411.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	60			
2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	2	6.600.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	10			
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Unit	3	0		2	95.000.000	0		2	70.000.000	2	70.000.000	6			
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	0	1	45.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	2			
2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2			
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	24	24	367.054.600	24	370.000.000	24	370.000.000	24	370.000.000	24	370.000.000	120			
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	83.182.600	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	12	85.000.000	60			
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	283.872.000	12	285.000.000	12	285.000.000	12	285.000.000	12	285.000.000	60			
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	5	6	277.413.600	6	282.100.000	6	282.100.000	6	282.100.000	6	282.100.000	30			
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	1	39.950.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1			
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	17	159.940.000	17	160.000.000	17	160.000.000	17	160.000.000	17	160.000.000	85			
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	17	22	15.580.000	22	17.000.000	22	17.000.000	22	17.000.000	22	17.000.000	110			
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	51.900.000	1	54.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000	1	54.000.000	1			
2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	14	8.540.000	14	9.500.000	14	9.500.000	14	9.500.000	14	9.500.000	70			
2.09.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0,096	0,0716	1.503.600	0,0716	1.600.000	0,0716	1.600.000	0,0716	1.600.000	0,0716	1.600.000	0,0716			
2	Meningkatnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,42	91,7		92		92,5		93		93,5		93,5			
2.09.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						668.788.500		873.757.000		668.789.000		679.355.000		690.090.000				
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya rasio lumbung pangan yang aktif	Rasio Lumbung Pangan Aktif	%	29,41	35,29		41,18	30.000.000	47,06	30.000.000	52,94	30.000.000	58,82	30.000.000	58,82	Bidang Pangan	Kabupaten Purworejo	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	0	0		1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1			
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4			
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein	Angka Kecukupan Energi	kkal/kapita/hari	1.866	1.880	555.749.200	1.900	655.348.000	1.950	525.749.000	1.980	634.530.000	1.990	543.450.000	1.990	Bidang Pangan	Kabupaten Purworejo	
			Angka Kecukupan Protein	gram/kap/hari	55,7	56		56,1		56,21		56,3		56,4		56,4	Bidang Pangan	Kabupaten Purworejo	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersusunnya Dokumen Ketersediaan Pangan	Dokumen Ketersediaan Pangan yang Disusun	Dokumen	1	1	46.153.300	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1			
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	1	36.743.800	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5			
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Dokumen	0	1	6.750.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	1	2.859.500	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5			
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tertaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota yang Disusun	Laporan	0	1	494.490.400	1	500.348.000	1	370.749.000	1	379.530.000	1	388.450.000	5			
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	0	40	494.490.400	40	500.348.000	30	370.749.000	30	379.530.000	30	388.450.000	170			
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tertaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	Kelompok	5	5	15.105.500	5	85.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	25			
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Tertaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4			
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tertaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengenekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	15.105.500	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5			
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan desa rentan pangan	Persentase penanganan desa rentan pangan	%	2,29	12,21	91.021.800	19,85	146.208.000	27,48	91.022.000	35,11	92.460.000	42,75	93.921.000	42,75	Bidang Pangan	Kabupaten Purworejo	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Disediakan	Dokumen	0	1	5.398.600	1	5.400.000	1	5.400.000	1	6.500.000	1	7.500.000	5			
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	0	1	5.398.600	1	5.400.000	1	5.400.000	1	6.500.000	1	7.500.000	5			
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertanganinya Kerawanan Pangan	Kerawanan Pangan yang Ditangani	Dokumen	1	1	85.623.200	1	140.808.000	1	85.622.000	1	85.960.000	1	86.421.000	5			
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Tertaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1	1	85.623.200	1	140.808.000	1	85.622.000	1	85.960.000	1	86.421.000	5			
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan	Persentase Pangan Segar Aman	%	100	100	22.017.500	100	42.201.000	100	22.018.000	100	22.365.000	100	22.719.000	100	Bidang Pangan	Kabupaten Purworejo	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Pengawasan Pangan Segar	Data Pengawasan Pangan Segar yang Disediakan	Dokumen	1	1	22.017.500	1	42.201.000	1	22.018.000	1	22.365.000	1	22.719.000	5			
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	3.039.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	5			
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	11.488.400	1	31.701.000	1	11.518.000	1	11.865.000	1	12.219.000	5			
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	7.490.100	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	5			
3	Meningkatnya produksi pertanian		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	-1,07	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25			
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-11,95	0,25		0,25		0,25		0,25		0,25		0,25			
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	-8,87	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4			
			Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	2,04	1		1		1		1		1		1			
3.27.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						23.130.393.800		18.165.244.000		17.569.464.000		17.600.521.000		17.632.069.000				
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya populasi ternak	Jumlah Populasi Ternak	ST/ tahun	117.322	120.868	11.853.910.500	122.681	7.041.202.000	124.521	7.041.202.000	126.389	7.041.202.000	128.284	7.041.202.000	128.284	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
		Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis	Jumlah Produksi Padi	Ton/ tahun	390.600	392.555		393.537		394.521		395.507		396.496		396.496	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Jagung	Ton/ tahun	6.635	6.675		6.695		6.715		6.735		6.755		6.755	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Cabai	Ton/ tahun	3.251	3.277		3.290		3.303		3.317		3.330		3.330	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Durian	Ton/ tahun	5.880	5.909		5.924		5.939		5.954		5.969		5.969	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Biofarmaka	Ton/ tahun	4.464	4.487		4.498		4.509		4.520		4.532		4.532	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Kelapa	Ton/ tahun	36.752	37.046		37.194		37.343		37.493		37.642		37.642	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Kopi	Ton/ tahun	165	166		167		168		168		169		169	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
			Jumlah Produksi Tembakau	Ton/ tahun	292	295		297		298		300		301		301	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Tertaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	3.301.428.800	1	3.591.202.000	1	3.591.202.000	1	3.591.202.000	1	3.591.202.000	5			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	1	1	3.301.428.800	1	3.091.202.000	1	3.091.202.000	1	3.091.202.000	1	3.091.202.000	5			
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	0	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4			
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang Dikelola	Dokumen	1	1	3.438.927.500	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	5			
		Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan	Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang Dikelola	Dokumen	1	1		1		1		1		1		5			
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Dokumen	1	1	3.020.780.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	5			
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	1	1	418.147.500	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000	5			
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang Dilaksanakan	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	5.113.554.200	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	5			
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	1.128	808	5.113.554.200	300	2.000.000.000	300	2.000.000.000	300	2.000.000.000	300	2.000.000.000	2.008			
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya pemanfaatan prasarana pertanian yang disediakan	Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	%	100	100	8.562.628.700	100	9.062.629.000	100	8.562.629.000	100	8.562.629.000	100	8.562.629.000	100	Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Purworejo	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0		1	650.000.000	0		0		0		0			
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B	Dokumen	0	0	0	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0	1			
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	8.546.385.700	1	8.350.000.000	1	8.500.000.000	1	8.500.000.000	1	8.500.000.000	5			
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	56	49	5.987.547.700	38	5.700.000.000	35	5.250.000.000	35	5.250.000.000	35	5.250.000.000	192			
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	1			
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	0	0	2	400.000.000	0	0	0	0	0	0	2			
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	17	20	2.558.838.000	15	2.250.000.000	15	2.250.000.000	15	2.250.000.000	15	2.250.000.000	80			
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	1			
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	2	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000	0	0	1			
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing	Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing yang Dikelola	Bulan	12	12	16.243.000	12	62.629.000	12	62.629.000	12	62.629.000	12	62.629.000	60			
3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Laporan	1	1	16.243.000	1	62.629.000	1	62.629.000	1	62.629.000	1	62.629.000	5			
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Kasus	306	294	396.842.700	288	396.843.000	282	396.843.000	276	403.113.000	270	409.482.000	270	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kabupaten Purworejo	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular	Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular yang Dilaksanakan	Kecamatan	0	0		16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000	16	20.000.000	16			
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	Laporan	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	Dokumen	0	0		1	22.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	0	0	0	1	22.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			

KODE	TUJUAN/ SASARAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME/ SASARAN KEGIATAN/ SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KONDISI AKHIR (2030)	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
						2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)				
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang Dikelola	Dokumen	1	1	346.623.900	1	304.843.000	1	306.843.000	1	313.113.000	1	319.482.000	5			
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	1	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4			
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	1	346.623.900	1	284.843.000	1	286.843.000	1	293.113.000	1	299.482.000	5			
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dilaksanakan	Dokumen	0	1	50.218.800	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5			
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasnya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	50.218.800	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5			
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	151.749.400	100	269.570.000	100	151.749.000	100	154.147.000	100	156.583.000	100	Bidang Sarana dan Perlindungan Tanaman	Kabupaten Purworejo	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	151.749.400	1	269.570.000	1	151.749.000	1	154.147.000	1	156.583.000	5			
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	752	250	151.749.400	450	269.570.000	250	151.749.000	250	154.147.000	250	156.583.000	1.450			
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	%	15,01	21,01	2.165.262.500	24	1.395.000.000	27,02	1.417.041.000	30,01	1.439.430.000	33	1.462.173.000	33	Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Purworejo	
			Skor Kapasitas Kelompok Tani	Skor	239	260		270		280		290		300		300	Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Purworejo	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	Kecamatan	16	16	2.165.262.500	16	1.395.000.000	16	1.417.041.000	16	1.439.430.000	16	1.462.173.000	16			
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	16	16	1.308.080.200	16	470.000.000	16	475.000.000	16	480.000.000	16	485.000.000	16			
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	2.512	2.500	764.835.800	2.500	765.000.000	2.500	774.041.000	2.500	784.430.000	2.500	792.173.000	2.500			
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	5	5	81.467.400	5	140.000.000	5	145.000.000	5	150.000.000	5	155.000.000	25			
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	1	1	10.879.100	1	20.000.000	1	23.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	5			
Jumlah							45.014.867.356		40.466.843.000		38.365.187.000		38.406.810.000		38.449.093.000				

Pembangunan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, setiap daerah merumuskan program prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan dengan cermat dan terencana. Untuk memastikan pencapaian tujuan program tersebut, diperlukan serangkaian subkegiatan yang terfokus dan terkoordinasi. Subkegiatan prioritas ini akan menjadi bagian integral dari upaya mencapai visi dan misi daerah, serta menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, subkegiatan prioritas adalah aktivitas-aktivitas yang dirancang untuk mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan program-program prioritas. Subkegiatan ini biasanya bersifat lebih teknis dan spesifik, dengan fokus pada kebutuhan nyata di lapangan. Oleh karena itu, daftar subkegiatan prioritas ini perlu disusun dengan mengacu pada kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur daerah yang bersangkutan.

Daftar subkegiatan prioritas dirancang untuk mendukung pencapaian program-program pembangunan daerah yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Setiap subkegiatan yang diusulkan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mendesak, tetapi juga untuk menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan. Prioritas dalam penyusunan subkegiatan ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat, potensi daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan bahwa pelaksanaan subkegiatan prioritas ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan warganya. Penetapan daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan/ Material	Penyediaan Bahan/ Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya rasio lumbung pangan yang aktif			
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein			
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM)	
				Penyelenggaraan Pasar Tani	
			Pemantauan Stok Pangan	Penyusunan Dokumen Pemantauan Stok Bahan Pangan	
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan	
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi	Pelatihan Pangan Lokal	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
				Sosialisasi pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	
				Lomba Olahan Pangan Lokal	
				Lomba Cipta Menu	
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan desa rentan rawan pangan			
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/ Kota	Pelatihan di desa rentan rawan pangan	
				Sosialisasi Stop Boros Pangan	
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan			
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota		
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	
				Pembinaan dan Monitoring ke Pelaku Usaha pangan segar asal tumbuhan	
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Pangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan alat dan mesin pertanian	
				Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	
				Pengembangan varietas unggul	
				Fasilitasi indikasi geografis komoditas pertanian	
				Pelatihan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian)	
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengadaan bibit tanaman	
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	penjaminan kelestarian sumber daya genetik kambing Kaligesing	
				Layanan inseminasi buatan	
				Kontes kambing kaligesing	
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	penyediaan bibit ternak kepada kelompok masyarakat	
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya kemanfaatan prasarana pertanian yang disediakan			
			Pengembangan Prasarana Pertanian		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Update data jaringan irigasi tersier	
			Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/ Kota	Update Peta LP2B	
			Pembangunan Prasarana Pertanian		
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan Air Tanah Dangkal (ATD)	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Puskesmas	
			Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)	
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Pengawasan wilayah sumber bibit Kambing Kaligesing	
8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis			
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota		
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	
				Pelatihan kader zoonosis	
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Layanan jasa laboratorium kesehatan hewan	
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Layanan kesehatan dan vaksinasi hewan	
				Promosi dan preventif kesehatan hewan	
				Surveilans/ pengamatan penyakit hewan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)	
				Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH)	
				Pengawasan hewan kurban	
				Operasional Rumah Potong Hewan (RPH)	
				Pembinaan pelaku usaha peternakan	
9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penyediaan pestisida/ insektisida	
				Sekolah Lapang Agensia Hayati	
				Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	
				Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	
10	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani			
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian	
				Fasilitasi Komisi Penyuluhan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				Penyusunan Program Penyuluhan	
				Pelatihan bagi penyuluh pertanian	
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan petani	
				Penilaian kelompok tani	
				Fasilitasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA)	
				Pembinaan petani muda	
				Pembinaan kelembagaan petani	
				Penyuluhan pertanian ramah lingkungan	
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan sekolah lapang pertanian	
			Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)	

4.2. Dukungan terhadap Nasional, Provinsi, dan Kegiatan Unggulan Daerah
Rencana Strategis (Renstra) bukan hanya berfungsi sebagai alat perencanaan internal untuk pencapaian tujuan suatu daerah, tetapi juga harus sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Hal ini penting agar setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung upaya pembangunan yang lebih besar dan holistik. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renstra adalah bagaimana daerah memberikan dukungan terhadap kebijakan nasional, provinsi, serta kegiatan unggulan yang telah ditetapkan.

a. Program yang Mendukung Program Nasional (Asta Cita dan Program Strategis Nasional)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta sebagai implementasi atas komitmen pemerintah dalam mewujudkan delapan agenda prioritas pembangunan nasional atau Asta Cita. Salah satu agenda penting dalam Asta Cita adalah Asta Cita 2, yaitu Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian Asta Cita 2, khususnya pada aspek swasembada pangan sebagai pilar utama kemandirian bangsa dan ketahanan nasional. Dukungan tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra tahun 2025–2029, antara lain:

1. Penguatan Produksi Pangan Lokal sebagai Basis Swasembada
Melalui program peningkatan produksi komoditas pangan strategis, seperti padi, jagung, dan hortikultura, serta pengembangan subsektor peternakan, Dinas mendorong optimalisasi sumber daya lahan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo. Upaya ini diarahkan untuk mencapai ketersediaan pangan yang cukup, berkelanjutan, dan berbasis pada potensi lokal daerah.
2. Peningkatan Kemandirian Pangan Masyarakat
Dinas melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan pemanfaatan pekarangan, gerakan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, serta edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri secara pangan dan tidak bergantung pada produk luar.
3. Penguatan Cadangan dan Distribusi Pangan Daerah
Guna mendukung stabilitas dan ketahanan pangan, Renstra Dinas juga memuat arah kebijakan peningkatan kapasitas cadangan pangan pemerintah daerah, penguatan sistem logistik pangan, serta pengendalian inflasi komoditas pangan strategis. Kegiatan ini berperan dalam menjamin ketersediaan pangan yang merata, terutama dalam kondisi darurat atau bencana.
4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian
Dalam mendukung agenda kemandirian yang berkelanjutan, Dinas mendorong transformasi digital di sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pertanian cerdas

(smart farming), akses pasar digital, serta integrasi data produksi dan distribusi pangan. Langkah ini selaras dengan semangat pengembangan ekonomi digital dalam Asta Cita 2.

5. Penguatan Ekonomi Hijau dalam Pertanian

Penerapan praktik pertanian ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, pengendalian hama terpadu, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), menjadi bagian dari strategi Dinas untuk mendukung ekonomi hijau. Ini juga merupakan langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pertanian serta ketahanan sumber daya alam daerah.

Melalui pelaksanaan berbagai strategi tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berperan langsung dalam membangun fondasi kemandirian daerah yang kuat, terutama dalam aspek ketahanan pangan yang menjadi unsur vital dalam sistem pertahanan negara. Ketahanan pangan yang kokoh bukan hanya menjamin kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi komponen penting dalam menciptakan stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.

Dengan demikian, pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tahun 2025–2029 merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Asta Cita 2, khususnya dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui pencapaian swasembada pangan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan. Penetapan dukungan terhadap astasita sebagaimana tertuang pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Dukungan terhadap Asta Cita

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
1	Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Pangan	DKPP
		Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM)	Pangan	DKPP
		Penyelenggaraan Pasar Tani	Pangan	DKPP
		Penyusunan Dokumen Pemantauan Stok Bahan Pangan	Pangan	DKPP
		Penyusunan Dokumen Neraca Bahan Makanan	Pangan	DKPP
		Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Pangan	DKPP
		Penyusunan dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)	Pangan	DKPP
		Pelatihan Pangan Lokal	Pangan	DKPP
		Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Pangan	DKPP
		Pelatihan di desa rentan rawan pangan	Pangan	DKPP
		Sosialisasi Stop Boros Pangan	Pangan	DKPP
		Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Pangan	DKPP
		Pembinaan dan Monitoring ke Pelaku Usaha pangan segar asal tumbuhan	Pangan	DKPP
		Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Pangan	Pertanian	DKPP

g

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pertanian	DKPP
		Pengadaan alat dan mesin pertanian	Pertanian	DKPP
		Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Pertanian	DKPP
		Pengembangan varietas unggul	Pertanian	DKPP
		Fasilitasi indikasi geografis komoditas pertanian	Pertanian	DKPP
		Pelatihan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian)	Pertanian	DKPP
		Pengadaan bibit tanaman	Pertanian	DKPP
		penjaminan kelestarian sumber daya genetik kambing Kaligesing	Pertanian	DKPP
		Layanan inseminasi buatan	Pertanian	DKPP
		Kontes kambing kaligesing	Pertanian	DKPP
		Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Pertanian	DKPP
		penyediaan bibit ternak kepada kelompok masyarakat	Pertanian	DKPP
		Update data jaringan irigasi tersier	Pertanian	DKPP
		Update Peta LP2B	Pertanian	DKPP
		Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pertanian	DKPP
		Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	Pertanian	DKPP
		Pembangunan Air Tanah Dangkal (ATD)	Pertanian	DKPP

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Pertanian	DKPP
		Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Puskesmas	Pertanian	DKPP
		Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)	Pertanian	DKPP
		Pengawasan wilayah sumber bibit Kambing Kaligesing	Pertanian	DKPP
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	Pertanian	DKPP
		Pelatihan kader zoonosis	Pertanian	DKPP
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pertanian	DKPP
		Layanan jasa laboratorium kesehatan hewan	Pertanian	DKPP
		Layanan kesehatan dan vaksinasi hewan	Pertanian	DKPP
		Promosi dan preventif kesehatan hewan	Pertanian	DKPP
		Survailans/ pengamatan penyakit hewan	Pertanian	DKPP
		Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)	Pertanian	DKPP
		Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH)	Pertanian	DKPP
		Pengawasan hewan kurban	Pertanian	DKPP
		Operasional Rumah Potong Hewan (RPH)	Pertanian	DKPP
		Pembinaan pelaku usaha peternakan	Pertanian	DKPP
		Penyediaan pestisida/ insektisida	Pertanian	DKPP
		Sekolah Lapang Agensia Hayati	Pertanian	DKPP

2

No	Asta Cita	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	Pertanian	DKPP
		Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu	Pertanian	DKPP
		Fasilitasi Balai Penyuluhan Pertanian	Pertanian	DKPP
		Fasilitasi Komisi Penyuluhan	Pertanian	DKPP
		Pelatihan bagi penyuluh pertanian	Pertanian	DKPP
		Pelatihan petani	Pertanian	DKPP
		Pembinaan petani muda	Pertanian	DKPP
		Pembinaan kelembagaan petani	Pertanian	DKPP
		Penyelenggaraan sekolah lapang pertanian	Pertanian	DKPP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran, strategi, serta program prioritas pembangunan sektor pangan dan pertanian di daerah. Renstra ini tidak hanya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah, tetapi juga berorientasi pada pencapaian agenda nasional, termasuk Program Strategis Nasional Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, merupakan tantangan multidimensional yang berdampak pada kesejahteraan, ketahanan pangan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memegang peran strategis dalam mendukung upaya pemerintah daerah dan pusat dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan berbasis penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan petani dan pekebun kecil, serta peningkatan akses terhadap sumber penghidupan yang produktif. Dukungan tersebut dituangkan dalam Renstra Dinas melalui beberapa kebijakan dan program berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan dan Aksesibilitas Pangan bagi Rumah Tangga Miskin

Dinas melaksanakan program penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, pengendalian inflasi komoditas pangan strategis, serta fasilitasi distribusi pangan bersubsidi. Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan memastikan tidak terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang dapat memperparah kondisi kemiskinan, terutama di wilayah rentan.

2. Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga Petani

Melalui program bantuan sarana dan prasarana pertanian, pelatihan keterampilan, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), Dinas mendukung peningkatan pendapatan dan kapasitas produksi masyarakat miskin yang bergantung pada sektor pertanian.

3. Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Dinas mendorong pembentukan kawasan pertanian terpadu (integrated farming) dan lumbung pangan desa yang melibatkan masyarakat miskin sebagai pelaku utama. Model ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di pedesaan.

4. Pemanfaatan Pekarangan dan Diversifikasi Sumber Pangan Keluarga

Salah satu strategi pengurangan kemiskinan ekstrem adalah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitar rumah tangga miskin. Program pemanfaatan pekarangan menjadi sarana untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan mengurangi beban pengeluaran pangan harian.

5. Sinergi dan Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo secara aktif menjalin sinergi lintas perangkat daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta lembaga sosial masyarakat dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan, termasuk melalui program padat karya, pendampingan usaha tani, dan fasilitasi akses permodalan serta pemasaran.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 juga disusun untuk mendukung pembangunan nasional adalah melalui partisipasi aktif dalam Program Strategis Nasional terkait Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Kabupaten Purworejo sebagai salah satu lumbung pangan strategis di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan dan stabilisasi beras nasional. Oleh karena itu, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo memuat arah kebijakan dan strategi yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan komoditas gabah/beras dalam negeri, sekaligus mengoptimalkan fungsi cadangan beras pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan masyarakat, terutama pada saat krisis, bencana, atau gejolak harga.

Adapun bentuk dukungan Renstra Dinas terhadap program strategis nasional tersebut meliputi:

1. Penguatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Padi

Renstra Dinas menempatkan peningkatan produksi padi sebagai salah satu prioritas utama. Melalui program intensifikasi pertanian, penyediaan benih unggul, pemanfaatan teknologi tepat guna, perbaikan jaringan irigasi pertanian, serta perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Dinas berupaya menjaga dan meningkatkan volume produksi gabah/ beras lokal untuk mendukung pengadaan dalam negeri.

2. Sinergi dalam Pengelolaan dan Penyerapan Gabah Petani

Dinas mendorong koordinasi antara petani, koperasi tani, Bulog, dan pelaku usaha penggilingan padi guna memperkuat sistem rantai pasok gabah. Upaya ini bertujuan agar harga gabah di tingkat petani tetap stabil dan penyerapan hasil panen oleh pemerintah atau mitra strategis dapat berjalan optimal, sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

3. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)

Sebagai bagian dari sistem cadangan pangan nasional, Dinas memiliki peran dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Renstra Dinas mengarahkan penguatan CPPD melalui pengadaan beras lokal berkualitas, pengelolaan gudang penyimpanan yang memenuhi standar, serta pemantauan berkala terhadap ketersediaan dan ketahanan stok.

4. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Kondisi Darurat dan Gejolak Harga

Dinas berperan aktif dalam mendukung penyaluran CBP untuk intervensi pasar, bantuan bencana alam, serta bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan pemutakhiran data penerima manfaat agar penyaluran CBP dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

5. Peningkatan Sistem Informasi dan Monitoring Pangan

Untuk mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan berbasis data, Dinas mengembangkan sistem informasi pangan daerah yang mencakup data produksi, konsumsi, distribusi, harga, dan stok gabah/ beras. Sistem ini menjadi landasan dalam merumuskan intervensi kebijakan dan perencanaan pengadaan serta penyaluran cadangan beras pemerintah secara efektif.

Dengan pelaksanaan program-program tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk menjadi

bagian dari solusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem secara bertahap dan berkelanjutan. Renstra ini secara konkret menunjukkan bahwa sektor pangan dan pertanian memiliki peranan sentral dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan melalui pendekatan produktif, berkeadilan, dan berbasis pemberdayaan.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya pada aspek pengelolaan beras sebagai pangan pokok strategis. Peran aktif ini tidak hanya memperkuat stabilitas pasokan dan harga beras, tetapi juga menjadi bagian integral dari perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana, krisis ekonomi, maupun gejolak pasar.

Melalui optimalisasi pelaksanaan program strategis ini, diharapkan terwujud masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera, mandiri secara ekonomi, serta memiliki ketahanan pangan yang kokoh sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Penetapan dukungan terhadap Program Strategis Nasional tertuang pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Dukungan Terhadap Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
1	2	3	4	5	6
1	Penanggulangan kemiskinan				
	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Pasar Tani	Pangan	DKPP
			Memantau harga dan pasokan pangan	Pangan	DKPP
			Pengadaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah	Pangan	DKPP
			Pelatihan olahan pangan lokal	Pangan	DKPP
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk desa rentan rawan pangan	Pangan	DKPP
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan jaringan irigasi tersier, air tanah dangkal, dan jalan usaha tani	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Alsintan	Pertanian	DKPP
			Penyediaan bibit ternak	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pelayanan kesehatan hewan	Pertanian	DKPP
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pertanian	DKPP

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan di Kabupaten Purworejo	Aktivitas Pendukung di 2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah Terkait
1	2	3	4	5	6
2	Ketahanan pangan				
	a. Pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengadaan cadangan pangan	Pangan	DKPP
	b. Penyaluran cadangan beras pemerintah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyaluran cadangan pangan	Pangan	DKPP

- b. Program yang Mendukung Program Provinsi (Program Delegasi Provinsi)
Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas yang didelegasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah memasukkan agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor peternakan, khususnya dalam bidang pemotongan hewan, ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Salah satu bentuk nyata dari dukungan tersebut adalah pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal (Juleha), serta pembinaan terhadap penerapan standar teknis Rumah Pemotongan Hewan (RPH) sesuai dengan ketentuan teknis dan syariat Islam. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjamin keamanan, higienitas, dan kehalalan produk pangan asal hewan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk peternakan lokal.

Dukungan Renstra difokuskan pada beberapa hal berikut:

1. Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Juru Sembelih Halal (Juleha)
Dinas menyelenggarakan pelatihan teknis bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dan instansi terkait, guna mencetak tenaga juru sembelih yang kompeten, bersertifikat, serta memahami prinsip animal welfare dan syarat-syarat penyembelihan halal.
2. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
Dalam rangka pemenuhan standar nasional dan syariat Islam, Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan RPH yang mencakup aspek kebersihan, sanitasi, perizinan, hingga tata cara pemotongan. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian operasional RPH dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan regulasi halal.
3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Pelaku Usaha Peternakan dan Masyarakat
Renstra juga mencakup kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha peternakan, pemilik RPH, serta masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal dan standar pemotongan hewan yang benar guna menjamin keamanan pangan dan perlindungan konsumen.
4. Kolaborasi dan Sinkronisasi Program dengan Pemerintah Provinsi
Dinas secara aktif menjalin koordinasi dan sinkronisasi program dengan Dinas Provinsi sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan desentralisasi teknis, serta memastikan kelancaran pelaksanaan program delegasi.

Melalui dukungan ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk turut andil dalam peningkatan mutu produk hewani, menjaga nilai-nilai kehalalan dalam proses produksi pangan, serta memperkuat sistem jaminan pangan daerah yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Penetapan dukungan terhadap program delegasi provinsi sebagaimana tertuang pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6.
Dukungan Terhadap Program Delegasi Provinsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan 5 Tahun ke Depan (2026-2030)	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Pertanian	DKPP
		Pelatihan juru sembelih halal	Pertanian	DKPP

c. Program yang Mendukung Program Kabupaten (Pitulungan)

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan yang menyeluruh dan berkelanjutan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo telah menetapkan dukungan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah terhadap Program Unggulan Daerah: Sejahtera Wargane.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, serta penguatan sistem pengawasan keamanan pangan di seluruh rantai pasok. Beberapa bentuk konkret dukungan Renstra antara lain:

1. Peningkatan Pengawasan dan Edukasi Keamanan Pangan
Dinas melaksanakan program pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan dan hewan. Selain itu, dilakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai praktik keamanan pangan, sanitasi, dan higiene dalam produksi serta pengolahan pangan.
2. Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Pangan Segar
Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan pangan, dinas mendorong pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi seperti Prima 3, NKV (Nomor Kontrol Veteriner), dan label pangan segar. Upaya ini bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi konsumen.
3. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
Untuk meningkatkan aksesibilitas pangan, khususnya saat terjadi krisis atau bencana, dinas mengelola cadangan pangan pemerintah daerah. Penguatan cadangan ini mencakup penyimpanan, rotasi stok, dan penyaluran pangan untuk penanganan rawan pangan serta stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.
4. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dan Toko Tani
Renstra juga memuat dukungan terhadap pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI) yang berperan sebagai simpul distribusi pangan murah dan sehat bagi masyarakat. Program ini diarahkan untuk memperpendek rantai distribusi dan memastikan keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen.
5. Peningkatan Akses Pangan bagi Wilayah Rawan Pangan dan Rentan Gizi
Dinas melakukan pemetaan wilayah rawan pangan dan menyusun intervensi spesifik, seperti distribusi pangan, dan pemberdayaan

kelompok tani untuk diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo juga disusun selaras dengan Program Unggulan Daerah: Ayem Petanine. Adapun bentuk dukungan strategis dalam Renstra terhadap enam fokus program unggulan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Penggunaan Alat Teknologi Pertanian (Pompa Air, Sprayer, Traktor Tangan, Sel Surya, dan Lainnya)
Renstra memuat program fasilitasi dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani guna mendukung mekanisasi pertanian. Peningkatan penggunaan teknologi seperti pompa air untuk irigasi, sprayer untuk pengendalian hama terpadu, traktor tangan untuk olah lahan, serta pemanfaatan energi alternatif seperti sel surya diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja konvensional.
2. Revitalisasi Sistem Pertanian
Dalam rangka memperbaiki sistem produksi yang berkelanjutan, Renstra mengakomodasi kegiatan penguatan kelembagaan petani, perbaikan sistem irigasi, peningkatan kualitas input pertanian, dan pengembangan sistem pertanian terpadu. Langkah-langkah ini mendukung terciptanya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar.
3. Optimalisasi Pemakaian Pupuk Organik
Dinas mendorong penggunaan pupuk organik melalui pelatihan pembuatan pupuk kompos dan biofertilizer, serta pemberdayaan kelompok tani organik. Upaya ini selaras dengan tujuan untuk menjaga kesuburan tanah, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, dan menghasilkan produk pertanian yang lebih ramah lingkungan dan sehat.
4. Pengembangan Infrastruktur Pertanian dalam Arti Luas
Renstra mengarahkan pengembangan infrastruktur pertanian yang mencakup pembangunan jalan usaha tani dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta prasarana pendukung pertanian lainnya. Infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung kelancaran proses produksi, distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses petani ke pasar.
5. Memperkuat Akses pada Informasi dan Teknologi Pertanian
Dinas mendukung penguatan sistem penyuluhan pertanian berbasis digital dan peningkatan kapasitas penyuluh. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, petani dapat memperoleh akses terhadap data iklim, harga pasar, teknologi budidaya, dan inovasi pertanian secara cepat dan akurat.
6. Modernisasi Pertanian
Renstra secara keseluruhan diarahkan untuk mendorong transformasi sektor pertanian menuju sistem pertanian modern melalui mekanisasi, digitalisasi, peningkatan SDM pertanian, serta pengembangan model pertanian presisi. Modernisasi ini juga didukung dengan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Melalui strategi-strategi tersebut, Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo secara aktif berkontribusi dalam menciptakan sistem pangan daerah yang aman, berkelanjutan, dan inklusif serta mewujudkan sistem pertanian yang tangguh, produktif, efisien, dan

adaptif terhadap tantangan zaman. Diharapkan, dukungan ini mampu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap ancaman kerawanan pangan sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Penetapan dukungan terhadap Program Unggulan Daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7.
Dukungan Terhadap Program Unggulan Daerah

No	Program Unggulan	Kegiatan Unggulan	2026-2030	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Sejahtera Wargane	Memperbaiki keamanan pangan dan menambah aksesibilitas pangan bagi masyarakat.	Pengawasan keamanan pangan	Pangan	DKPP
			Pengadaan cadangan pangan pemerintah	Pangan	DKPP
2	Ayem Petanine	Menambah penggunaan alat teknologi pertanian (seperti pompa air, sprayer, traktor tangan, sel surya, dll)	Penyediaan Alsintan	Pertanian	DKPP
		Revitalisasi sistem pertanian	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Pertanian	DKPP
			Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
			Pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan bencana pertanian	Pertanian	DKPP
		Mengoptimalkan pemakaian pupuk organik	Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
		Pengembangan infrastruktur pertanian dalam arti luas	Penyediaan prasarana pertanian	Pertanian	DKPP
		Memperkuat akses pada informasi dan teknologi pertanian	Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
		Modernisasi pertanian	Penyediaan Alsintan	Pertanian	DKPP
			Penyuluhan pertanian	Pertanian	DKPP
			Pelayanan inseminasi buatan	Pertanian	DKPP

4.3. Penentuan Indikator dan Target Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purworejo serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan bidang ketahanan pangan dan pertanian secara berkelanjutan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan sejumlah indikator kinerja utama (IKU) yang relevan, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Indikator-indikator tersebut mencerminkan capaian yang hendak diraih selama periode Rencana Strategis, serta menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, evaluasi, dan pengendalian kinerja organisasi perangkat daerah. Adapun indikator kinerja dan target yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian peningkatan produksi komoditas utama tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar. Penetapan target dilakukan berdasarkan potensi wilayah, tren historis produksi, serta dukungan program peningkatan produktivitas dan intensifikasi pertanian.

2. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura

Indikator ini mencerminkan pertumbuhan produksi komoditas hortikultura strategis, seperti sayuran dan buah-buahan. Target ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar, potensi agroklimat, serta dukungan sarana produksi dan pengembangan kelembagaan petani hortikultura. Komoditas hortikultura yang dihitung adalah: alpukat, anggur, belimbing, duku/ langsung/ kokosan, durian, jambu air, jambu biji, jengkol, jeruk besar, jeruk, jeruk siam/ keprok, jeruk pamel, jeruk lemon, lengkeng, mangga, manggis, markisa/ konyal, melinjo, buah naga, nangka/ cempedak, nenas, pepaya, petai, pisang, rambutan, sawo, salak, sirih, sukun, bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai besar/ tw/ teropong, cabai keriting, cabai rawit, jamur, jamur lainnya, jamur tiram, kacang panjang, kangkung, mentimun, labu siam, melon, semangka, terung, tomat, dlingo/ dringo, jahe, jeruk nipis, kapulaga, kencur, kunyit, laos/ lengkuas, lempuyang, mahkota dewa, mengkudu/ pace, rimpang, serai hijau, temuireng, temukunci, dan temulawak.

3. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan

Indikator ini mengukur kontribusi subsektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Komoditas yang dihitung adalah: aren, cengkeh, jambu mete, jarak pagar, kakao, kapok, karet, kelapa dalam, kelapa deres, kelapa genjah, kemukus, kenanga, kopi arabika, kopi robuska, lada, pala, panili, nilam, tebu, dan tembakau. Target diarahkan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk perkebunan daerah.

4. Persentase Peningkatan Produksi Daging

Indikator ini mencerminkan kinerja subsektor peternakan, khususnya dalam peningkatan ketersediaan protein hewani. Target pertumbuhan produksi daging ditetapkan berdasarkan strategi peningkatan populasi ternak, perbaikan manajemen pakan dan kesehatan ternak, serta dukungan pengembangan agribisnis peternakan. Komoditas yang dihitung adalah: sapi, kerbau, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, itik, kelinci, burung puyuh, angsa, entog, dan merpati.

5. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/ PoU*)

Indikator ini digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang mengalami kekurangan asupan energi dari konsumsi pangan.

Penurunan angka prevalensi PoU menjadi target strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

6. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator ini mencerminkan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH yang tinggi menunjukkan pola konsumsi yang lebih seimbang dan sesuai dengan anjuran gizi seimbang. Target skor ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan konsumsi pangan rumah tangga dan intervensi edukasi gizi masyarakat.

7. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator ini mengukur akuntabilitas kinerja instansi melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Target diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, serta implementasi manajemen kinerja berbasis hasil di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Seluruh indikator tersebut telah dirumuskan melalui pendekatan partisipatif, memperhatikan kebijakan nasional, prioritas daerah, serta analisis sumber daya dan potensi lokal. Dengan penetapan indikator dan target yang terukur dan realistis, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat secara umum. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8.
Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Tujuan dan Sasaran
2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Tujuan dan Sasaran
3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	Tujuan dan Sasaran
4	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Tujuan dan Sasaran
5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	12,50	11,93	11,37	10,80	10,23	9,66	Tujuan
6	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,73	91,70	92,00	92,50	93,00	93,50	Sasaran
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	70,45	72,89	75,33	77,76	80,20	Tujuan dan Sasaran

Sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/1685/Bangda tanggal 17 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang menekankan pentingnya intervensi sensitif melalui sektor pangan dan pertanian.

Indikator-indikator ini dirumuskan secara terukur, relevan, dan berbasis hasil (*outcome-oriented*), sehingga mampu menjadi alat ukur pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, kesehatan hewan, dan kontribusi terhadap percepatan penurunan stunting. Adapun indikator kinerja kunci yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan masyarakat)

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan pokok secara berkelanjutan, khususnya cadangan beras dan jagung sebagai komoditas utama. Ketersediaan pangan yang memadai merupakan syarat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah, menekan gejolak harga, serta mengantisipasi krisis pangan. Target ditetapkan berdasarkan proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat, kapasitas produksi lokal, serta kemampuan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).

2. Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun

Indikator ini mengukur kinerja sektor pertanian dalam meningkatkan efisiensi dan hasil produksi pada setiap satuan lahan usaha tani. Peningkatan produktivitas menjadi kunci dalam menjamin ketersediaan pangan, peningkatan pendapatan petani, dan keberlanjutan sistem pertanian. Target produktivitas ditetapkan berdasarkan tren historis, potensi wilayah, serta intervensi program peningkatan sarana produksi, inovasi teknologi budidaya, dan penguatan penyuluhan pertanian.

3. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Indikator ini mencerminkan kapasitas daerah dalam melaksanakan program kesehatan hewan dan pengendalian penyakit zoonosis yang dapat berdampak langsung pada produksi ternak dan kesehatan masyarakat. Penurunan angka kejadian penyakit hewan menular seperti PMK, antraks, dan rabies menjadi indikator penting dalam menjaga keberlanjutan subsektor peternakan dan menjamin keamanan pangan asal hewan. Target ditetapkan berdasarkan hasil surveilans, cakupan vaksinasi, serta respons cepat terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) di lapangan.

4. Ketersediaan Program Pemanfaatan Pekarangan

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas nasional, karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi kesehatan, kecerdasan, maupun produktivitas. Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pendekatan konvergensi, yaitu keterpaduan berbagai program lintas sektor di tingkat pusat, daerah, hingga desa dan kelurahan. Dalam konteks ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo turut berkontribusi melalui penyediaan dan pelaksanaan program pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Program pemanfaatan pekarangan, seperti Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Pekarangan Pangan untuk Meningkatkan Pendapatan (Karang Pandan) dan budidaya tanaman sayur dan ternak skala rumah tangga, bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) di tingkat keluarga. Kegiatan ini secara langsung mendukung peningkatan asupan gizi anak dan ibu hamil, yang merupakan kelompok sasaran utama dalam intervensi penurunan stunting.

Hubungan erat antara program ini dan aksi konvergensi PPPS terletak pada aspek intervensi sensitif, yaitu intervensi yang berkontribusi terhadap penurunan stunting secara tidak langsung melalui peningkatan ketahanan pangan keluarga dan perbaikan pola konsumsi. Dengan tersedianya sumber pangan bergizi dari pekarangan, keluarga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini memperkuat partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam mendukung pencapaian indikator konvergensi stunting, khususnya pada aksi keempat (analisis situasi), aksi kelima (rencana kegiatan), dan aksi keenam (rembuk stunting) yang membutuhkan identifikasi dan pelibatan program sektoral di tingkat desa.

Lebih lanjut, keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada integrasi dengan kegiatan Posyandu, PKK, dan penyuluhan gizi yang dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat kecamatan dan desa. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, melalui penyuluh dan tenaga teknis, turut berperan dalam memberikan edukasi pemanfaatan pekarangan serta pembinaan keluarga penerima manfaat untuk memastikan bahwa pangan yang dihasilkan benar-benar mendukung kebutuhan gizi anak dan ibu.

Dengan demikian, penyediaan program pemanfaatan pekarangan tidak hanya menjadi instrumen ketahanan pangan lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dalam mendukung pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sisi gizi dan kesehatan.

5. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Penetapan target untuk indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/ PoU*) merupakan langkah strategis dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*), khususnya Tujuan 2: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.

Indikator ini mengukur persentase penduduk yang asupan energinya tidak mencukupi kebutuhan minimum energi harian yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan sehat dan aktif. Penetapan target dilakukan berdasarkan data historis, tren prevalensi dari tahun-tahun sebelumnya, serta proyeksi kondisi sosial-ekonomi dan intervensi kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah. Selain itu, penyesuaian terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh FAO dan ketersediaan data nasional juga menjadi pertimbangan utama.

Target yang ditetapkan harus realistis namun ambisius, dengan mempertimbangkan potensi peningkatan akses pangan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, pengurangan kemiskinan, serta penguatan sistem distribusi pangan. Penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan secara bertahap mencerminkan

keberhasilan berbagai program pemerintah, termasuk program perlindungan sosial, perbaikan gizi, serta pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan.

Dengan penetapan target ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki acuan yang jelas dalam merumuskan kebijakan dan program kerja, serta memastikan sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seluruh indikator dan target kinerja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran berbasis kinerja, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan pendekatan yang terarah dan terukur, diharapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh, produktif, dan inklusif, sekaligus mendukung pencapaian target nasional dalam percepatan penurunan stunting. Penetapan Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tertuang pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	Permendagri No. 18 Tahun 2020
2	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ ha	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	Permendagri No. 18 Tahun 2020
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-19,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	Permendagri No. 18 Tahun 2020
4	Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan	Desa	7	7	7	7	7	7	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)
5	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	12,50	11,93	11,37	10,80	10,23	9,66	IUP

BAB IV PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merupakan penjabaran Dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo, serta memuat arah kebijakan, strategi, indikator kinerja utama, dan kerangka pendanaan yang mendukung pencapaian pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Dokumen Rencana Strategis ini disusun dengan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo tahun 2025-2045 serta memperhatikan keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan pembangunan, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, sehingga diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Dalam dokumen ini telah dirumuskan berbagai strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang kemudian diterjemahkan dalam Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 dimana pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2030. Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta indikator kinerja penyelenggaraan urusan yang diampu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta proyeksi kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setiap tahunnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

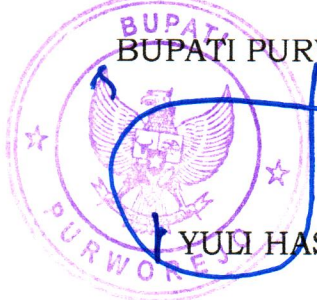
- a. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setiap tahun.
- b. Konsistensi perencanaan dan pendanaan disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.
- c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian wajib menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dilakukan setiap tahun selama periode renstra.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- c. Pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko.

BUPATI PURWOREJO, 



YULI HASTUTI